

**PEMBERDAYAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA**

(Studi di Kampung Keluarga Berencana Kotalama Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan

Oleh

Annisa Izzatul Ulya

NIM 145120607111024



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Alur Pikir Peneliti	28
Bagan 3.1	Model Analisis Data Interaktif Hubermas dan Miles.....	37
Bagan 4.1	Ruang Lingkup Pelaksanaan Kampung KB	42
Bagan 4.2	Struktur Organisasi Kampung KB Kotalama.....	46
Bagan 4.3	Struktur Kepengurusan UPPKS “Nusa Indah”	58



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedungkandang	7
Diagram 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kampung KB Kotalama.....	49
Diagram 4.2	Jumlah berdasarkan Jenis Kelamin Kampung KB Kotalama.....	50
Diagram 4.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung KB Kotalama.....	50
Diagram 4.4	Jumlah Pasangan Usia Subur Kampung KB Kelurahan Kota Lama Tahun 2016.....	51
Diagram 4.5	PUS <i>Unneed Meet</i> Kampung KB Kota Lama Tahun 2016.....	52
Diagram 4.6	Mata Pencarian Masyarakat Kampung KB Kotalama.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angka Fertilitas Di Indonesia Tahun 2007 dan 2012.....	1
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1	Daftar Informan Peneliti.....	35
Tabel 4.1	Jumlah KK dan Penduduk Kampung KB Kotalama.....	55
Tabel 4.2	Data Kelompok UPPKS pada Kampung KB Kota Lama Tahun 2018.....	59



KATA PENGANTAR

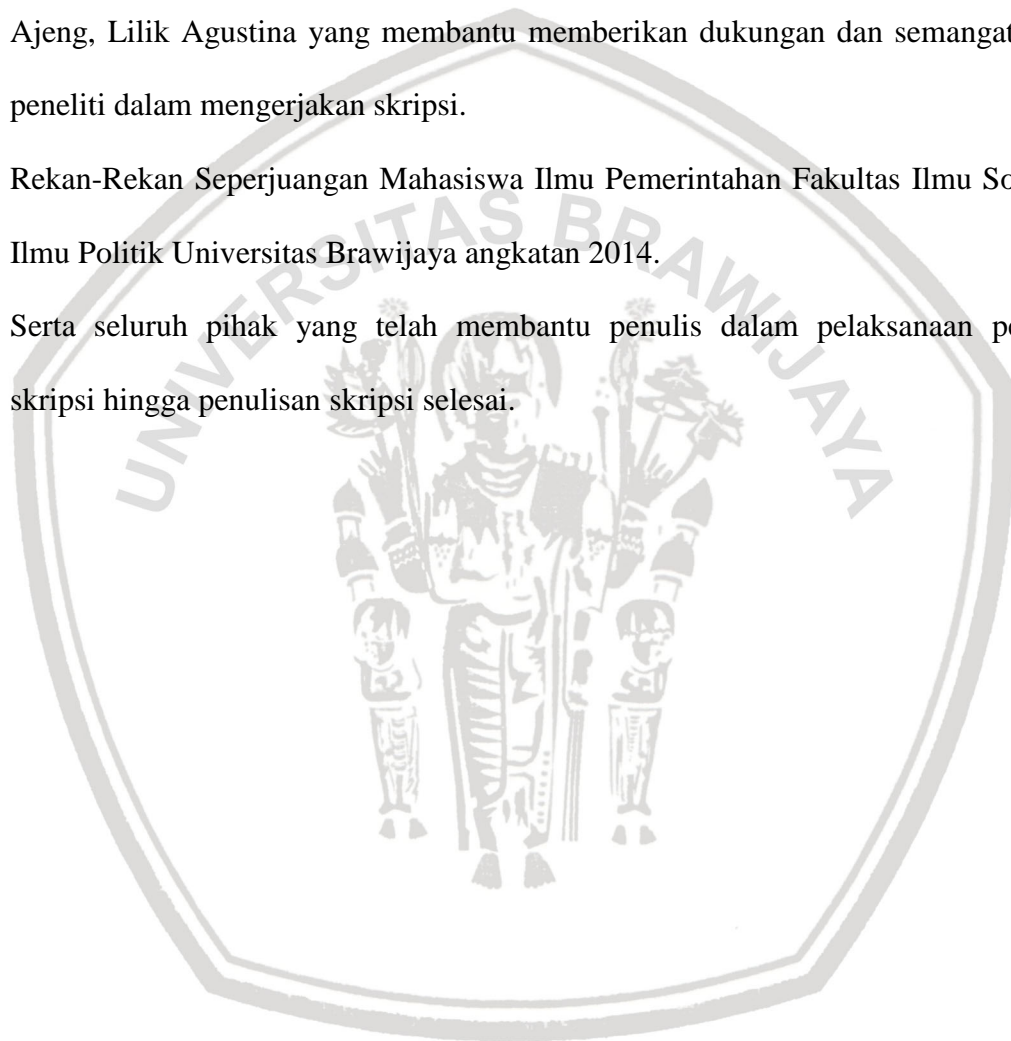
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Program Kampung Keluarga Berencana (Studi di Kampung Keluarga Berencana Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”**. Penelitian skripsi yang disusun oleh peneliti sebagai syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan di Dinas Sosial Kota Malang. Pada proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat masukan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan dalam segala hal yang terbaik bagi penulis.
2. Dr. Dra. Hj. Alifiulathin Utaminingsih, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk mengambil tema skripsi ini.
3. Tia Subekti, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan arahan dan nasehat bagi penulis dalam perbaikan maupun penyempurnaan skripsi yang dibuat oleh penulis.
4. Joko Purnomo S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan memberikan data yang berguna bagi skripsi penulis, diantaranya, Bapak

Sapto Wibowo selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Malang, Ibu Endang Purwati Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat DP3AP2KB Kota Malang, Ibu Tri Dina Mikarini selaku PLKB Kelurahan Kotalama, Bapak Joko Siswo Bintoro selaku Lurah Kotalama, serta masyarakat Kelurahan Kotalama yang telah bersedia membantu memberikan data bagi peneliti lapangan.

6. Zenith Nafigati ,Yousi Novita, Caprillya Helen Vidora, Tika Martyana, Dhikna Ajeng, Lilik Agustina yang membantu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi.
7. Rekan-Rekan Seperjuangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya angkatan 2014.
8. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian skripsi hingga penulisan skripsi selesai.



ABSTRAK

Annisa Izzatul Ulya, (2018). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Program Kampung Keluarga Berencana (Studi di Kampung Keluarga Berencana Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Alifiulathin Utaminingsih, M.Si dan Tia Subekti, S.IP.,MA

Setelah diberlakukannya program Keluarga Berencana (KB) ke dalam otonomi daerah, dengan prioritas pembangunan yang berbeda di masing-masing daerah, membuat program KB tidak berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan menurunnya kesertaan ber-KB pada masyarakat serta masih tingginya angka *Total Fertility Rate (TFR)*. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Keprihatinan akan permasalahan kemiskinan di Indonesia ini melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan melalui Program Kampung KB. Program ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Program KKBPK yang dijalankan di Kampung KB Kotalama sendiri masih belum maksimal salah satunya kelompok kegiatan UPPKS. Kajian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat UPPKS pada program Kampung KB Kelurahan Kotalama dengan menggunakan konsep Mardi Yatmo Hutomo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Proses pengambilan data dengan metode wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan UPPKS. *Pertama*, bantuan modal. Bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah untuk kelompok kegiatan UPPKS masih minim. *Kedua*, bantuan pendampingan. Pelatihan yang diberikan hanya setahun sekali sehingga masyarakat belum dapat menerima hasil dari pelatihan yang diberikan. *Ketiga*, penguatan kelembagaan. Kelembagaan tingkat kota maupun kelompok UPPKS “Nusa Indah” belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antar pengurus. *Keempat*, penguatan kemitraan. Kegiatan UPPKS Kampung KB Kotalama belum menjalin kemitraan dengan pihak manapun, sehingga mengalami kendala dalam segi pemasaran. Hasil dari penelitian ini pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kegiatan UPPKS pada program Kampung KB sudah berjalan dengan cukup baik dan telah menciptakan produk unggulan seperti bawang goreng dan bumbu-bumbu instan tradisional. Sedangkan kendala yang utama anggota adalah bantuan modal dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan UPPKS.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Keluarga Berencana Kota Malang, dan UPPKS.

ABSTRACT

Annisa Izzatul Ulya, (2018). *Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, Family Income Increased Prosperous (UPPKS) empowerment on the Program Hometown family planning (Studies in family planning Kotalama Kedungkandang sub district of Malang)... Supervisor: Dr. Dra. Alifiulathin Utaminingsih, M.Si and Tia Subekti, S.IP.,MA*

After the establishment of family planning program (KB) into the autonomous areas, with a different development priorities in each region, the program is not running optimally KB. It is characterized by declining participation air-KB on society as well as the still high number of Total Fertility Rate (TFR). One of the factors that influenced fertility rate in Indonesia is a problem of poverty. The concern will be the problem of poverty in Indonesia this gave birth to a concept of development on population, insightful or concept sustainable development through Kampung KB. This program has been implemented in several areas in Indonesia, one of them in the village Kotalama Kedungkandang sub district of Malang. The KKBPK program runs in its own Kotalama still not KB maximum of one of these group activities UPPKS. This study analyzes the community empowerment UPPKS program at Kampung KB Kotalama Village by using the concept of Mardi Yatmo Hutomo. This research used a qualitative approach to research methods, types of descriptive research. The process of retrieving data by the method of interview, documentation. The results showed that there are four forms of community empowerment activities in UPPKS. First, capital assistance. Capital assistance given by the Government to group the activities of UPPKS are still minimal. Second, the help of mentoring. Training which is given only once a year so that people can not accept the results of the training provided. Third, institutional strengthening. City level institutional and group UPPKS Nusa Indah "has not been going well for a lack of coordination. Fourthly, the strengthening of partnerships. The activities of UPPKS Kampung KB Kotalama have yet to establish a partnership with any party, so experiencing constraints in terms of marketing. The results of this research community empowerment through group activities UPPKS in Kampung KB has been running pretty well and has created a superior product like fried onions and instant Marinades is traditional. Whereas the main obstacles are members of aid capital and lack of partisipasi community in the development of UPPKS.

Keywords: empowerment of community, Program Kampung KB Malang City and UPPKS.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah diberlakukannya program Keluarga Berencana (KB) ke dalam otonomi daerah, dengan prioritas pembangunan yang berbeda di masing-masing daerah, membuat program KB tidak berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan menurunnya kesertaan ber-KB pada masyarakat serta masih tingginya angka *Total Fertility Rate* (TFR).¹ Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) tahun 2012, dapat diketahui bahwa tingkat fertilitas (TFR) di Indonesia masih cukup tinggi. Selain itu, perbedaan variasi TFR antar provinsi juga cukup besar. Dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Angka Fertilitas Total menurut Provinsi 2007 dan 2012

Provinsi	2007	2012	Provinsi	2007	2012
Aceh	3,10	2,80	NTB	2,80	2,80
Sumatera Utara	3,80	3,00	NTT	4,20	3,30
Sumatera Barat	3,40	2,80	Kalimantan Barat	2,80	3,10
Riau	2,70	2,90	Kalimantan Tengah	3,00	2,80
Jambi	2,80	2,30	Kalimantan Selatan	2,60	2,50
Sumatera Selatan	2,70	2,80	Kalimantan Timur	2,70	2,80
Bengkulu	2,40	2,20	Sulawesi Utara	2,80	2,60
Lampung	2,50	2,70	Sulawesi Tengah	3,30	3,20
Bangka Belitung	2,50	2,60	Sulawesi Selatan	2,80	2,60
Kepulauan Riau	3,10	2,60	Sulawesi Tenggara	3,30	3,00
DKI Jakarta	2,10	2,30	Gorontalo	2,60	2,60
Jawa Barat	2,60	2,50	Sulawesi Barat	3,50	3,60
Jawa Tengah	2,30	2,50	Maluku	3,90	3,20
DI Yogyakarta	1,80	2,10	Maluku Utara	3,20	3,10
Jawa Timur	2,10	2,30	Papua Barat	3,40	3,70
Banten	2,60	2,50	Papua	2,90	3,70
Bali	2,10	2,30	Indonesia	2,60	2,60

¹ Jurnal Keluarga BKKBN Edisi keenam, 2016, SDGs, Nawacita dan Kampung KB, hlm 1.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, tingkat fertilitas total di Indonesia tahun 2012 mengalami peningkatan dari yang awalnya 2,41 pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 2,60. Provinsi-provinsi yang di Pulau Jawa cenderung memiliki tingkat fertilitas total lebih rendah dari pada provinsi-provinsi lainnya di luar Pulau Jawa. Seperti pada Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki nilai fertilitas total sebesar 2,1 anak per wanita. Meskipun nilai tersebut merupakan nilai TFR yang terendah, namun nilai ini mengalami peningkatan dari hasil sensus penduduk sebelumnya pada tahun 2010 yang sebesar 1,94 anak per wanita. Provinsi yang memiliki nilai TFR tertinggi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki TFR yang sama yakni 3,7. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki TFR tertinggi pada tahun 2010, menjadi peringkat keempat pada tahun 2012, yakni sebesar 3,3 anak per wanita.² Meskipun mengalami penurunan, namun angka ini tergolong tinggi, dan menandakan bahwa provinsi NTT masih menjadi salah satu provinsi dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki isu kemiskinan sebagai salah satu isu yang perlu dituntaskan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,66 %, dengan rentang terendah 3,7 % yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan persentase penduduk miskin yang tertinggi

² Badan Pusat Statistik, <http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/SDKI> diakses pada 11 Juli 2018

didapatkan oleh Papua sebesar 30,66 %.³ Hasil yang didapatkan tersebut, menunjukkan adanya korelasi antara kemiskinan dengan tingkat fertilitas total masyarakat di Indonesia. Tingginya persentase penduduk miskin dapat menyebabkan tingginya tingkat fertilitas pula.

Masalah kemiskinan masih merupakan tantangan utama di dalam upaya melaksanakan pembangunan di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan biasanya disertai dengan pengangguran, kekurangan gizi, kebodohan, status wanita yang rendah, rendahnya akses ke pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Faktor-faktor ini memberikan kontribusi terhadap tingginya fertilitas serta rendahnya produktivitas.

Keprihatinan akan permasalahan kemiskinan di Indonesia ini melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan. Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini

³ Badan Pusat Statistik,
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18%2000:00:00/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2017.html>, diakses pada 11 Juli 2018 pukul 08 : 11 WIB

kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana.

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi *miniature* atau gambaran dari sebuah wilayah yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu "satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis".⁴

Program KKBPK sendiri merupakan Pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengentasan kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Program pembangunan keluarga yang terakumulasi dalam KKBPK dengan empat pokok garapan yaitu Pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ditambah dengan pengendalian, pemantauan, pengamatan serta pembinaan penduduk merupakan

⁴ Materi Kampung KB.Pdf

bagian dari pengentasan kemiskinan.⁵ Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat.⁶ Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, sehingga wadah Kampung KB ini dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik.

Pada pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo Kampung KB mendapat perhatian dan apresiasi yang tinggi, sehingga program ini dijadikan salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan yang ingin dicapai dari Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah miskin, padat penduduk, pinggiran. Selain itu, Kampung KB juga dilakukan sebagai salah satu upaya melaksanakan prioritas pembangunan nasional yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI (Nawa Cita Ke-3).⁷

⁵ Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana BKKBN Tahun 2017

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Salah satu daerah yang sudah menerapkan Kampung KB adalah Kota Malang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Kota Malang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dengan jumlah penduduk 851 298 jiwa.⁸ Padatnya jumlah penduduk di Kota Malang ini sekaligus melatarbelakangi dibentuknya Program Kampung KB. Dalam pembentukannya, dipilih Kelurahan Kotalama sebagai Kampung KB pertama di Kota Malang mengingat Kelurahan Kotalama memiliki kriteria pembentukan Kampung KB yang ditinjau dari kriteria utama pembentukan Kampung KB dimana jumlah peserta KB dibawah rata-rata tingkat desa/kelurahan. Seperti yang diketahui, kesadaran ber-KB di wilayah tersebut sangat rendah sedikitnya jumlah peserta KB hanya mencapai 12,53 % dari rata-rata ber-KB di Kota Malang 79%. Selanjutnya jumlah Pra-KS dan KS I diatas rata-rata Pra-KS dan KS I tingkat kelurahan yang mana jumlah keluarga yang dikategorikan sebagai Pra-KS dan KS-I di wilayah tersebut berjumlah 3002 KK atau mencapai 34% dari rata-rata kota.⁹

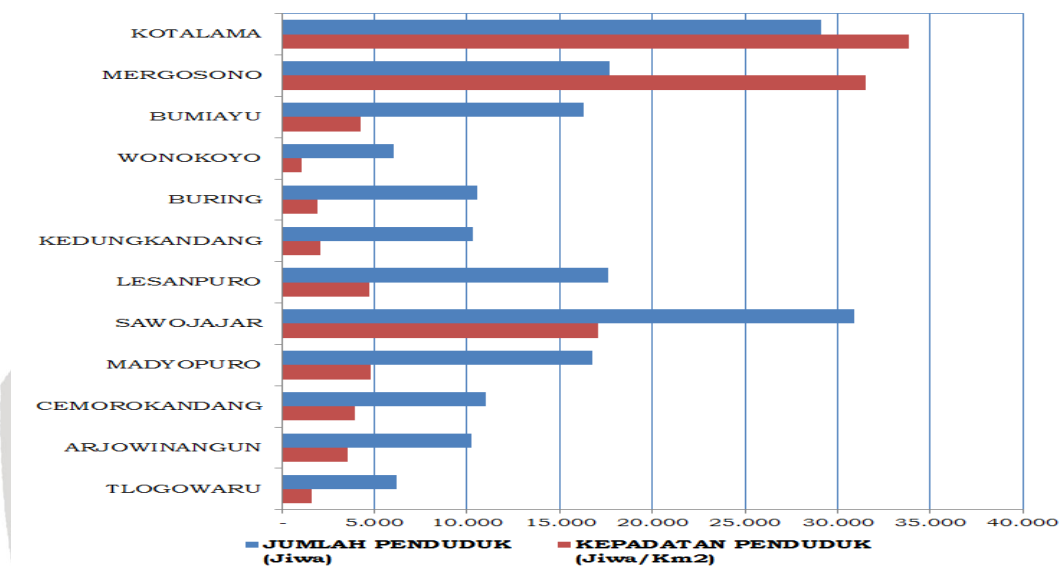
Ditinjau dari kriteria wilayah, Kelurahan Kotalama dikategorikan sebagai kawasan padar penduduk yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bantaran kereta api. Kepadatan penduduk di wilayah tersebut cukup tinggi. Dari dua belas kelurahan di Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Kotalama menduduki peringkat pertama sebagai jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Pada tahun 2016 jumlah penduduk

⁸ Badan Pusat Statistik, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2010-2014-dan-2015.html>

⁹ Data Inventarisasi Kampung KB Kelurahan Kotalama Tahun 2016

di Kelurahan Kota Lama sebanyak 29.126 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 30.839 jiwa.¹⁰

Diagram 1.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedungkandang Kota Malang



Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah, 2018

Sejak dicanangkannya program Kampung KB di Kota Malang pada tanggal 14 April 2016 di Kota Malang, sudah ada enam Kampung KB yang saat ini berdiri di masing-masing kecamatan. Ada lima kecamatan yang tersebar yang masing-masing terdapat Kampung KB. Untuk Kampung KB seperti di Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Kasin, Kelurahan Purwodadi dan di Kelurahan Sukun yang baru terbentuk pada Oktober Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya sendiri program Kampung KB di Kotalama belum berjalan dengan

¹⁰ Ibid

maksimal. Dimana masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kelompok kegiatan, salah satunya UPPKS.¹¹

UPPKS merupakan kelompok kegiatan pendukung program Kampung KB yang menjadi salah satu bagian dari program KKBPK yang anggotanya dikhususkan untuk Keluarga Pra- Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan wirausaha sekaligus ber-KB secara mandiri. Kelompok yang dirintis melalui Kampung KB ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga peserta KB agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Program UPPKS pada prinsipnya adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan ibu-ibu/wanita yang antara lain berasal dari keluarga Pra sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan sejahtera III plus baik yang belum, sedang, maupun purna peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Pembentukan kelompok UPPKS di Kampung KB Kotalama ini sekaligus sebagai wahana pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi guna meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera bagi masyarakat Kelurahan Kotalama. Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung KB Kotalama yang terbelakang mulai dari banyaknya jumlah Pra KS sebanyak 168 KK, kemudian tidak sedikit penduduk yang bekerja sebagai pekerja lepas baik pemulung, kuli bangunan, pengemis dan tukang becak. Terlebih jumlah pemulung dan pengasong yang ada di wilayah tersebut cukup banyak yakni 55 orang. Dimana kelompok usaha masyarakat di wilayah tersebut belum ada, sehingga diharapkan dengan adanya

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sulton selaku Kabid Pembangunan Masyarakat DP3AP2KB Kota Malang pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 12.45 WIB

Program Kampung KB ini dapat menyadarkan masyarakat untuk menggugah minat dan semangat untuk berwirausaha guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui poktan UPPKS Program Kampung KB.

Dari permasalahan diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait UPPKS Program Kampung KB di Kotalama ini guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui UPPKS Program Kampung KB yang dijalankan oleh DP3AP2KB Kota Malang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pada Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan adanya masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek bantuan modal

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek bantuan pendampingan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek penguatan kelembagaan
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek penguatan kemitraan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek bantuan modal
2. Mengetahui bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek bantuan pendampingan
3. Mengetahui bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek penguatan kelembagaan
4. Mengetahui bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana pada aspek penguatan kemitraan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai tinjauan pustaka terkait penelitian terhadulu yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan fokus penulis. Bab ini juga akan menjelaskan terkait teori penelitian yang digunakan penulis untuk analisis permasalahan. Selain itu, bab ini membahas mengenai alur pikir penelitian yang digunakan sebagai kerangka atau pijakan teoritik dalam penulisan skripsi. Selain itu alur pikir ini digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur penelitian dalam skripsi ini.

2.1 Studi Terdahulu

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti membutuhkan reverensi terkait hasil- hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal tersebut digunakan sebagai acuan peneliti dalam memfokuskan pembahasan. Reverensi ini juga digunakan untuk melengkapi hasil penelitian terhadulu serta ataupun membahas fokus yang berbeda. Dalam penyajikan penelitian terdahulu dengan mengklasifikasikan berdasarkan judul penelitian,metode penelitian, titik pembeda dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, hasil penelitian Mardiyono yang berjudul “Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPk dan Terkait di Jawa Timur. (Studi di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan)”.

Jenis penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian tersebut yakni mengevaluasi keberhasilan Kampung KB melalui tahapan Penelitian Operasional yang terdiri dari tahap identifikasi, intervensi, monitoring, evaluasi. Hasil penelitian yang didapat keberhasilan kampung KB sangat ditentukan oleh peran aktif keluarga atau masyarakat diberbagai tingkatan, untuk itu perlu adanya intervensi program, dana, sarana, prasarana, KIE, advokasi, penggerakan dan pendampingan dari SKPDKB dan lintas sektor dengan target akhir gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan, maka kampung KB bisa dianggap sebagai prakarsa publik bukan semata program pemerintah. Peran Bupati sangat penting bersama Tim Pokja Kampung KB Kabupaten/Kota dengan melibatkan anggota DPRD duduk bersama mengagendakan program intervensi di kampung KB sekaligus untuk menjaga kesinambungan program. Diperlukan pendampingan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dan pelatihan “Skill” pada kelompok UPPKS dan Poktan lainnya serta penyediaan dana APBD dalam mendukung advokasi, KIE dan penggerakan di wilayah kampung KB.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Soleha dengan judul “*Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara*”. Fokus penelitian ini yakni mencari dampak positif dan negatif program Keluarga Berencana di Desa Bangun Mulya, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KB. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan

¹ Mardiyono. 2017. *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK dan Terkait di Jawa Timur. (Studi di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan)*. Jurnal Keluarga Berencana, Vol 2 No. 1, 2017 .

bahwa dengan program KB masyarakat dapat lebih fokus dalam menentukan masa depan keluarga dikarenakan beban keluarga yang stabil dengan berkurangnya angka kelahiran serta hubungan antara istri dan suami dapat saling membantu dalam mensejahterakan masyarakat keluarga serta tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga.²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Intan Riana Dewi dengan judul *“Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka Di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta”*. Penelitian ini menjelaskan mengenai keefektifan program UPPKS terhadap kelompok Soka. Dalam melakukan analisis keefektifan program menggunakan 5 indikator yakni pemahaman program, keteatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan berdasarkan perubahan nyata. Hasil penelitian ini ada beberapa program UPPKS Kelompok soka yang sudah efektif dan ada juga yang belum efektif.³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lody Hadiansyah dengan judul *“Dampak Program UPPKS Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Surakarta”*. Penelitian ini membahas mengenai dampak dari program UPPKS. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah program UPPKS memberikan dampak yang cukup baik. Manfaat yang dirasakan

² Siti Soleha, 2016. *Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda.

³ Indah Riana Dewi, 2012. *Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka Di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

oleh anggota UPPKS Menur 18 diantaranya mampu meningkatkan pendapatan keluarga, mampu dijadikan alternatif pekerjaan sampingan, mengembangkan potensi SDM serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.⁴

Kelima, penelitian Elsa Setiawati S, dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli*”. Fokus penelitian yaitu mengetahui tanggapan masyarakat terhadap program Kampung KB dan tindakan masyarakat terhadap program kampung KB Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli. Jenis penelitian menggunakan Jenis penelitian adalah Deskriptif kualitatif dan Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik quota sampling dan purposive sampling. Hasil penelitian yang didapat bahwa hasilnya adalah Sangat baik atau sangat setuju dengan adanya program Kampung KB. hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat yang mana melalui sikap/tanggapan, tindakan dan harapan masyarakat, dan diperkuat oleh adanya program Kampung KB yang antra lain penggunaan alat kontrasepsi dan kebersihan lingkungan.⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan Aminatuz Zuhriyah,dkk dengan judul “*Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana* “. Fokus penelitian adalah mengevaluasi program Kampung Keluarga Berencana dari aspek pemberdayaaan meliputi input, proses, dan output

⁴ Lody Hadiyansyah. 2017.*Dampak Program UPPKS Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan EkonomiEkonomi dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Surakarta*. Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UNS Surakarta.

⁵ Elsa Setiawati.2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli*.Jurnal.Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

pemberdayaan Kampung Keluarga Berencana. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian input program belum sesuai indikator karena tidak adanya dana kegiatan dan kurangnya SDM. Proses kegiatan Kampung KB belum sesuai dengan rencana kegiatan yang sebaiknya dilakukan karena kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan PKK. Belum semua indikator output terpenuhi, dari 20 indikator hanya 10 indikator yang terpenuhi hal tersebut terjadi karena kurangnya SDM dan dana untuk kegiatan serta kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan masih rendah ⁶

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan Ayu Purnami Wulandari dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*”. Fokus penelitian adalah menganalisis kegiatan pemberdayaan masyarakat Purbalingga melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat desa melalui Pelatihan pembuatan Sapu Gelagah di desa Kajongan sudah sesuai dengan tahap pemberdayaan.⁷

⁶ Aminatuz Zuhriyah,dkk.2017. *Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana* .Jurnal Ilmiah. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

⁷ Ayu Purnami Wulandari,2014. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*.Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Yogyakarta

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Mardiyono. 2017. <i>Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPB dan Terkait di Jawa Timur. (Studi di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan).</i> Jurnal Keluarga Berencana, Vol 2 No. 1, 2017 .	Jenis penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif.	- Lokasi Penelitian - Fokus penelitian yaitu mengevaluasi keberhasilan Kampung KB melalui tahapan Penelitian Operasional yang terdiri dari tahap identifikasi, intervensi, monitoring, evaluasi.	Hasil penelitian yang didapat keberhasilan kampung KB sangat ditentukan oleh peran aktif keluarga atau masyarakat diberbagai tingkatan, untuk itu perlu adanya intervensi program, dana, sarana, prasarana, KIE, advokasi, penggerakan dan pendampingan dari SKPDKB dan lintas sektor.
2	Siti Soleha, 2016. <i>Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.</i> Skripsi. Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda.	Jenis Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif.	- Lokasi penelitian - Fokus penelitian ini yakni mencari dampak positif dan negatif program Keluarga Berencana di Desa Bangun Mulya, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KB.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan program KB masyarakat dapat lebih fokus dalam menentukan masa depan keluarga dikarenakan beban keluarga yang stabil dengan berkurangnya angka kelahiran serta hubungan antara istri dan suami dapat saling membantu dalam mensejahterakan masyarakat keluarga serta tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga
3	Indah Riana Dewi, 2012. <i>Efektifitas</i>	Jenis penelitian yang	- Lokasi penelitian - Penelitian	Hasil penelitian ini ada beberapa program UPPKS

	<i>Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka Di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta.</i> Skripsi iUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	digunakan adalah metode penelitian kualitatif	tersebut menganalisis keefektifan program menggunakan 5 indikator yakni pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan berdasarkan perubahan nyata.	Kelompok soka yang sudah efektif dan ada juga yang belum efektif.
4	Lody Hadiyansyah. 2017. <i>Dampak Program UPPKS Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Surakarta.</i> Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UNS Surakarta.	Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif.	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Penelitian ini berfokus pada dampak dari program UPPKS 	Hasil penelitiannya adalah program UPPKS memberikan dampak yang cukup baik. Manfaat yang dirasakan oleh anggota UPPKS Menurut 18 diantaranya mampu meningkatkan pendapatan keluarga, mampu dijadikan alternatif pekerjaan sampingan, mengembangkan potensi SDM serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
5	Elsa Setiawati. 2017. <i>Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantoloan Boya</i>	Jenis penelitian adalah Deskriptif kualitatif dan Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik quota	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Fokus penelitian yaitu mengetahui tanggapan masyarakat terhadap program kampung KB dan tindakan 	Hasil penelitian yang didapat bahwa hasilnya adalah Sangat baik atau sangat setuju dengan adanya program Kampung KB. hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat yang mana melalui sikap/tanggapan,

	<i>Kecamatan Tawaeli. Jurnal. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako</i>	sampling dan purposive sampling.	masyarakat terhadap program kampung KB Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli.	tindakan dan harapan masyarakat, dan diperkuat oleh adanya program kampung KB yang antra lain penggunaan alat kontrasepsi dan kebersihan lingkungan.
6.	Aminatuz Zuhriyah, dkk. 2017. <i>Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana</i> . Jurnal Ilmiah. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang	Jenis penelitian deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Fokus penelitian adalah mengevaluasi program kampung keluarga berencana dari aspek pemberdayaan meliputi input, proses, dan output pemberdayaan kampung keluarga berencana.. 	Hasil penelitian belum semua indikator output terpenuhi, dari 20 indikator hanya 10 indikator yang terpenuhi hal tersebut terjadi karena kurangnya SDM dan dana untuk kegiatan serta kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan masih rendah
7	Ayu Purnami Wulandari, 2014. <i>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan</i>	Jenis penelitian deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Penelitian - Fokus penelitian pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah 	Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat desa melalui Pelatihan pembuatan Sapu Gelagah di desa Kajongan sudah sesuai dengan tahap pemberdayaan ⁸

⁸ Ayu Purnami Wulandari, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Yogyakarta

	Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Yogyakarta			
8	Novie Istoria Hidayah. 2017. <i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta</i> . Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta	Jenis penelitian Deskriptif Kualitatif	- Lokasi Penelitian - Fokus penelitian yakni pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata	Hasil penelitian yaitu menganalisis pemberdayaan masyarakat menggunakan konsep Mardi Yatmo Hutomo yang meliputi bantuan modal, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan. ⁹

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber

⁹ Novie Istoria Hidayah. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

keaktivitas. Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).¹⁰ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹¹

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang; b) memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya; c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, serta fasilitas-fasilitasnya.¹²

¹⁰ Edi Sugarto.2005.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*.Bandung: PT Ravika Adimatama. Cet Ke-1. Hlm.57

¹¹ Ibid,Hlm 58

¹² I Nyoman Sumaryadi.2005.*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama. Hlm 114

Sedangkan menurut Prijono dan Pranarka, menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pertama, *to give power or authority*, meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kedua, *to give ability to or enable*. Maksudnya adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.¹³

Menurut Soekanto, mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikankesempatan dan menjamin keberlanjutan dari berbagai hasil yang dicapai.¹⁴

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara

¹³ Ambar Teguh Sulistyani.2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. hlm 78

¹⁴ Soeharto, Edi dkk. 2004. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial dan Pekerjaan Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press. Hlm 33

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha untuk memberikan atau meningkatkan potensi yang sudah ada dalam masyarakat. Masyarakat di dorong, di motivasi, dan ditingkatkan kesadarannya akan potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian potensi tersebut dikembangkan. Dari pemberdayaan ini masyarakat dapat hidup lebih mandiri dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera.

2.2.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah kondisi dimana mereka memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai

¹⁵ Ambar Teguh Sulistyani *Op.Cit.*

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.¹⁶

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

2.2.1.3 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi.¹⁷ Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang; b) memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya; c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar,

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ambar Teguh Sulistyani.2017.*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.Yogyakarta: Gava Media.hlm 82

serta fasilitas-fasilitasnya.¹⁸ Secara umum, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000) dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :¹⁹

a. Bantuan modal

Pemberdayaan masyarakat dalam hal permodalan merupakan salah satu aspek yang sering dihadapi. Aspek permodalan ini sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya.

b. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama seorang pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat. Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan.

c. Penguatan Kelembagaan

Adanya sebuah lembaga atau organisasi di tengahnya masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Fungsi dari keberadaan lembaga

¹⁸ I Nyoman Sumaryadi.2005.*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama. Hlm 114

¹⁹ Novie Istoria Hidayah.2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*.Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta

tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.

d. Penguatan kemitraan

Pemberdayaan masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar. Daya saing yang tinggi hanya ada jika keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab, hanya dengan keterkaitan yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan masing-masing pihak akan diberdayakan.

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁰

2.2.1.4 Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok lain yang

²⁰ Ibid, hlm 60

terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.²¹

- a. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan

²¹ *Op.Cit.* Edi Suharto hlm 67

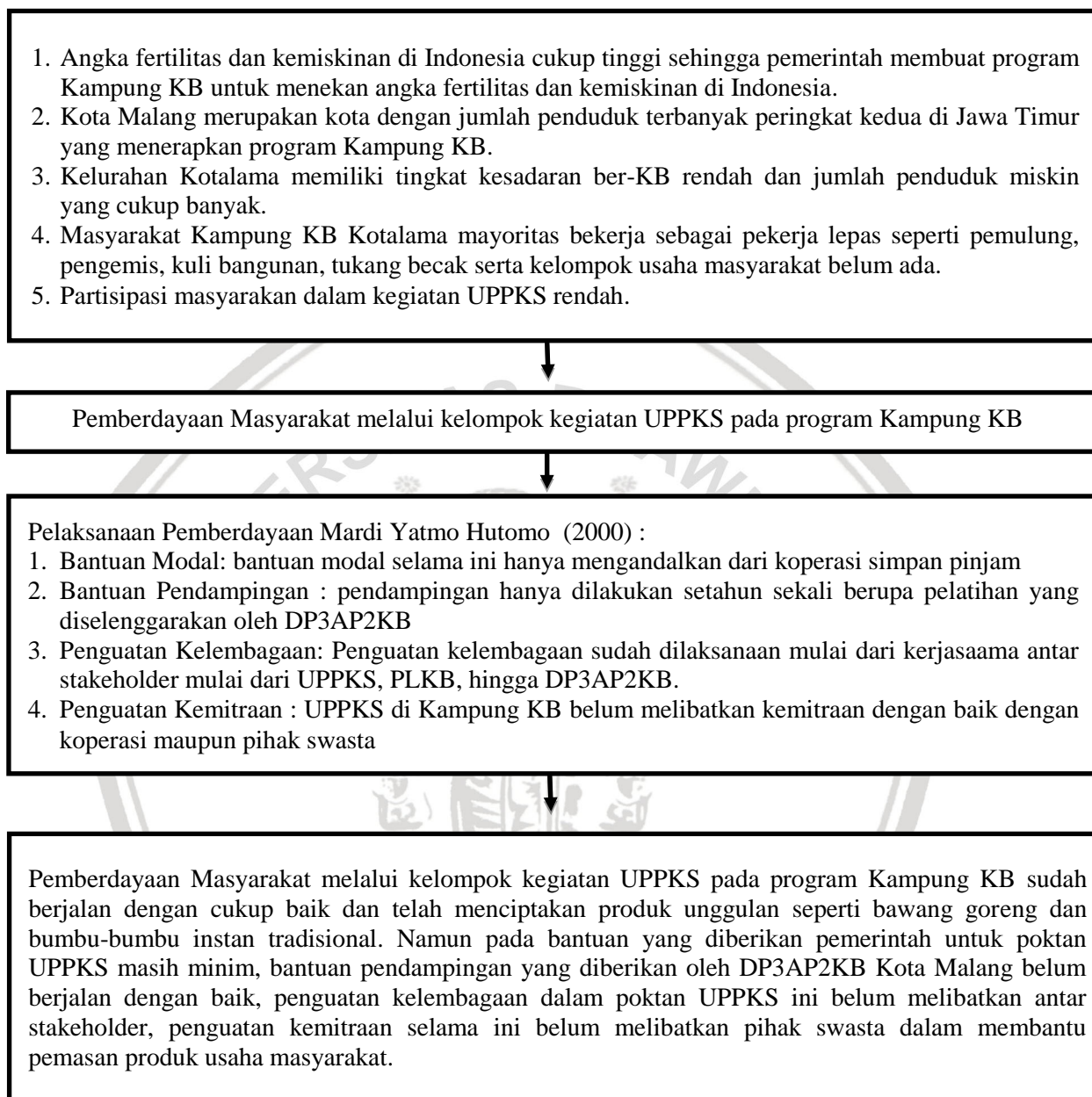
harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.3 Alur Pikir Penelitian

Untuk memudahkan dalam penelitian mulai dari mencari data, proses analisis dan memaparkan hasil analisis maka peneliti membuat alur pikir penelitian. Berdasarkan dari pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah hingga teori dan konsep yang digunakan penulis, maka penulis menentukan alur pikir sebagai berikut :

Bagan 2.1 Alur Pikir Peneliti



Sumber : Olahan Peneliti 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan jenis penelitian, fokus dan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Bogdon dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Sementara menurut Flick, definisi penelitian kualitatif merupakan keterkaitan

¹ Lexy J. Moleong. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h 3

spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.² Dengan tujuan diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta secara apa adanya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi daerah tertentu.³ Jenis ini dilakukan dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. Untuk memperoleh data- data tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut: teknik survei, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku dan gerak dan analisis dokumenter.⁴

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penting dilakukan agar pada saat melakukan penelitian. Hal ini agar mempermudah peneliti dalam pembahasan nantinya lebih terarah tidak melenceng dari fokus utama. Peneliti mengambil fokus pada bagaimana bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu, di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut

² Bogdan & Taylor Dalam Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 81

³ Suryana. 2010. "*Metodologi penelitian "model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif* ". " Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.hlm 18

⁴ *Ibid.* hlm 20

dalam penelitian ini karena Kelurahan Kotalama merupakan lokasi yang menerapkan Program Kampung KB pertama di Kota Malang. Selain itu penelitian juga dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Malang sebagai lembaga pemerintah yang menangani Program Kampung Keluarga Berencana. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 12 Februari 2018- 9 Mei 2018. Dilakukan dua hari dalam seminggu dan dua jam dalam sehari.

3.4 Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan beberapa komponen dalam mengulas hasil penelitian tersebut. Data disini merupakan salah satu komponen penting dalam mengkaji suatu penelitian. Adapun jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan dari kedua jenis data tersebut, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi yakni peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Selain itu data primer juga dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan opini informan yakni melalui wawancara. Peneliti menggunakan data primer ini melalui penggalian informasi dan dokumentasi

dari para informan dan berbagai situasi sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan UPPKS Kampung Keluarga Berencana Kotalama dan berbagai pihak yang dianggap berkompeten untuk mendukung dan memperkuat fakta di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen publik seperti buku, jurnal, artikel, Peraturan Daerah Kota Malang, data resmi DP3AP2KB Kota Malang dan Kelurahan Kotalama, serta data lain yang berkaitan dengan Program Kampung KB, serta data yang berkaitan dengan pemberdayaan UPPKS di wilayah tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Kecermatan dalam teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi objektivitas dalam penelitian. Untuk itu diperlukan ketelitian agar pemilahan data sesuai dengan ketentuan penelitian yang berlaku. Adapun cara yang penulis lakukan dalam memperoleh data sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁵ Teknik pengumpulan data berupa wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang mendukung di dalam proses penelitian kualitatif. Terdapat dua jenis wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.⁶ Sehingga dalam wawancara terstruktur pewawancara akan menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Hal demikian bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh pewawancara. Berbeda dengan wawancara tak terstruktur yang mana merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subjek.⁷ Sehingga didalam wawancara tak terstruktur pewawancara menggali informasi mengalir sesuai dengan keadaan subjek yang akan diteliti. Jenis wawancara tak terstruktur ini peneliti jauh lebih mudah didalam menggali informasi yang akan dicari.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dipilih dengan alasan *pertama*, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan alami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa

⁵ Burhan Bungin.2010.*Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta:Rajawali Pers Hlm.155

⁶ Opcit. Burhan Bungin, Metode Penelitian.hlm.156

⁷ Ibid. Burhan Bungin, Metode Penelitian.hlm.156

sekarang dan juga masa mendatang.⁸ Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berpedoman pada *interview guide* dan dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil wawancara dilakukan oleh penulis dengan mencatat setiap hal penting yang disampaikan oleh informan secara langsung dan dengan bantuan alat bantu berupa *tape recorder*. Terkait dengan waktu dan tempat wawancara disesuaikan dengan kesediaan masing-masing informan.

Sedangkan untuk menemukan narasumber yang memiliki informasi terdapat beberapa teknik dalam menentukan informan yaitu secara *snowball sampling*, *purposive sampling*, dan *redundancy sampling*. Peneliti nantinya akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan teknik ini sebelum melakukan wawancara, peneliti menentukan target narasumber terlebih dahulu. Terdapat jenis golongan informan dalam sebuah penelitian, yaitu antara lain:⁹

1. Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berikut beberapa daftar narasumber yang akan menjadi informan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni :

⁸ Hamid Patilima.2005.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : Alfabeta.Hlm.65

⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, 2010, "*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*", Jakarta; Kencana, Hlm. 228

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Sapto Wibowo, SH., M.Hum	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Malang
2	Dra. Endang Purwati	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
3	Joko Siswo Bintoro SG,ST	Kepala Lurah RW 8 Kota Lama
4	Tri Dina Mekarini	PLKB Kelurahan Kota Lama
5	Yuli Astutik	Kader KB Kampung KB dan Ketua UPPKS “Nusa Indah”
6	Bunide	Anggota UPPKS “NUSA INDAH”
7	Sri Mulyati	Anggota UPPKS “NUSA INDAH”
8	Titin	Anggota UPPKS “NUSA INDAH”
9	Ika Susanti	Anggota UPPKS “NUSA INDAH”
10	Mani	Anggota UPPKS “NUSA INDAH”
12	Djuwartiningsih, SE	Ketua AKU Kota Malang

Sumber : Olahan Peneliti 2018

Berdasarkan data narasumber diatas, peneliti memiliki dua belas informan sebagai narasumber untuk melakukan wawancara dilapangan. Informan yang dipilih tentunya berdasarkan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lengkap dari sumber yang dipercaya. sebagai informan kunci dari pelaksana program ini yakni Sapto Wibowo, Endang Purwati dan Tri Dina Mekarini sebagai pelaksana program dan sebagai informan kunci dari penerima program yakni Tutik sebagai ketua kelompok UPPKS “Nusa Indah” karena yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya Sri Mulyati, Titin, Bunide, Mani, dan Ika Susanti sebagai informan utama karena terlibat langsung dalam program. Kemudian Djuwartiningsih sebagai informan tambahan.

3.5.2 Dokumentasi

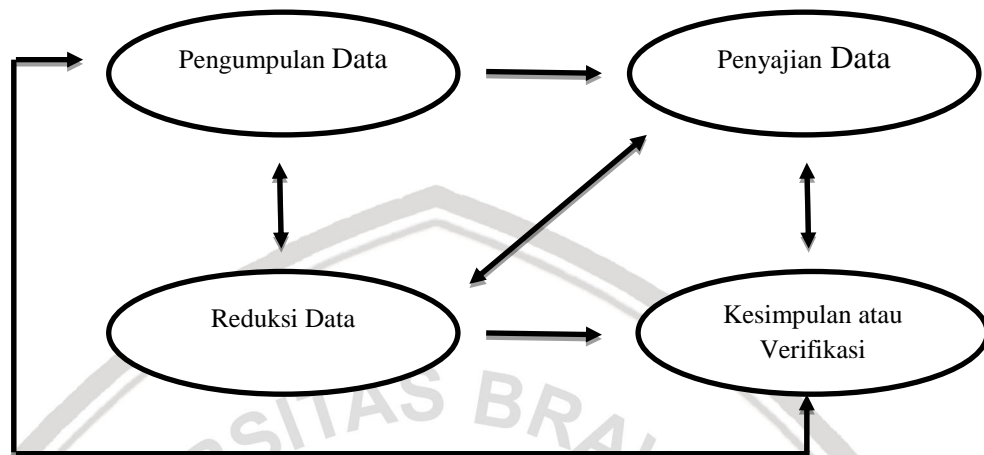
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis selanjutnya ialah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan, gambar, dan lain sebagainya..Dokumen dalam penelitian digunakan sebagai data pelengkap dari data utama yang diperoleh dari wawancara. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Surat Edaran Mendagri tentang pembentukan dan pencanangan Kampung KB, Surat Keputusan Walikota terkait kelompok kerja Kampung KB, Surat Keputusan Lurah Kotalama tentang pembentukan kelompok kegiatan UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB, data inventarisasi Kampung KB Kotalama.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh semua data, peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, serta mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus penelitian.¹⁰ Analisis data kualitatif dimulai pada saat penulis memulai penelitian dengan memilah data, sehingga data yang dipilah dapat membantu untuk dipahami dengan mudah. Dalam menggunakan teknik analisis data, penulis menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

¹⁰ Imam Gunawan, *Op.Cit*, Hlm. 209

Bagan 3.1.
Model Analisis Data Interaktif Menurut Hubermas dan Miles



Sumber: Miles dan Huberman .2014.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:UI Press.hlm.20

Analisis data interaktif Miles dan Huberman memiliki empat tahap. Tahap *pertama* yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subyek penelitian, informan penelitian, dan melakukan observasi dilapangan. Hal ini bagian dari proses pengambilan data yang kemudian akan diproses dan dianalisis.

Tahap *kedua*, reduksi data. Analisis data melalui reduksi data dilakukan ketika peneliti mulai melakukan penelitian, yang mana peneliti mendapatkan banyak data dan beragam. Melalui tahap ini nantinya data lebih di terinci berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum dan difokuskan pada hal – hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah – milah berdasarkan konsep atau tema akan memberikan gambaran yang tajam terkait hasil

pengamatan. Hal ini juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data tambahan dari data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Tahap *ketiga*, penyajian data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, bagan, bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya untuk mempermudah dan memahami yang sedang terjadi. Penyajian data ini juga berfungsi dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Tahap *keempat*, penarikan kesimpulan / verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, apabila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat akan merubah kesimpulan awal tersebut. Tetapi apabila kesimpulan awal di dukung dengan temuan bukti – bukti yang dikuat saaa peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumuskan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan menjadi jelas. Ketiga tahapan diatas, analilis data yang telah diperoleh merupakan hasil proses interaksi antara ketiga tahapan analisis, serta merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai.



BAB IV

DESKRIPSI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KOTALAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

4.1 Program Kampung Keluarga Berencana

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

4.1.1 Prasyarat Wajib Pembentukan Kampung KB Kotalama

Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Adapun prasyarat wajib yang dipenuhi dalam pembentukan Kampung KB yaitu:

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

Dalam Pembentukan Kampung KB di Kotalama, semua data terkait administrasi yang ada di Kelurahan Kotalama sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pembentukan Kampung KB

2. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Perintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam rangka menjalin kemitraan dan komitmen lintas sektor dalam kegiatan Kampung KB di Kotalama dengan dibentuknya Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Malang yang ditimbang melalui SK Walikota Malang Nomor : 188.45/192/35.71.112/2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Malang.

Berdasarkan SK Walikota Malang, susunan keanggotaan meliputi tim pengarah yang terdiri dari ketua yakni Walikota Malang, Wakil yakni Wakil Walikota Malang, kemudian sekretaris yakni Sekretaris Daerah Kota Malang. Sedangkan untuk tim pelaksana diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana. Dan anggota yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang; 3. Kepala Dinas Pendidikan; 4. Kepala Dinas Sosial Kota Malang;

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Komandan Kodim 0833 Malang; 7. Kepala Kepolisian Resort Malang Kota; 8. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang; 9. Camat Se-Kota Malang.

3. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi aktif

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Kampung KB Kotalama ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan Kampung KB di Kotalama ini melibatkan peran masyarakat setempat baik lurah, PLKB, PKK, BKM, LPMK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Bidan Wilayah, Babinsa, Babinkamtibmas, maupun penyuluh agama di kelurahan Kotalama.

4.1.2 Model Penggarapan Kampung Keluarga Berencana Kotalama

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB Kotalama meliputi: 1. Kependudukan; 2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) yang terdiri dari poktan BKB, BKL, BKR, PIK-R dan UPPKS; 4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB.

Bagan 4.1
Ruang Lingkup Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana



Sumber : Olahan Peneliti, 2018

4.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan Kampung KB Kotalama

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB Kotalama meliputi:

1. Kependudukan;
2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya)

4.1.4 Sasaran Penggarapan Kampung Keluarga Berencana Kotalama

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB Kotalama ini adalah :

1. Keluarga

2. Remaja
3. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
4. Pasangan Usia Subur (PUS)
5. Keluarga dengan balita
6. Keluarga dengan remaja
7. Keluarga dengan lansia
8. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing

Selanjutnya pelaksana Program Kampung Keluarga Berencana di Kotalama

ini, diantaranya adalah :

1. Kepala Lurah
2. Ketua RW
3. Ketua RT
4. PKB/PLKB/TPD
5. Petugas Lapangan sektor terkait
6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan
7. Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di kelurahan)
8. Kader

4.1.5 Kriteria Pemilihan Kampung KB Kotalama

1. Kriteria Utama

Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah:

- a. Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada. Jumlah Pra KS dan KS I di Kelurahan Kotalama sebanyak 3002 KK.

- b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi. Jumlah peserta KB 12,58 % dibawah rata-rata Kota Malang 79 %.

2. Kriteria Wilayah

Setelah terpenuhi dua kriteria di atas sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut: a. Kumuh b. Pesisir/Nelayan; c. Daerah Aliran Sungai (DAS); d. Bantaran Kereta Api; e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan); f. Terpencil; g. Perbatasan; h. Kawasan Industri; i. Kawasan Wisata; j. Padat penduduk. Dalam kriteria ini Kampung KB Kotalama dipilih berdasarkan padat penduduk, Daerah Aliran Sungai dan Bantaran Kereta Api.

3. Kriteria Khusus

- a. Kriteria Data Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
- b. Kriteria Kependudukan Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah
- c. Kriteria Program Keluarga Berencana 1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; 2) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; 3) Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
- d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga
 - 1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga
 - 2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga

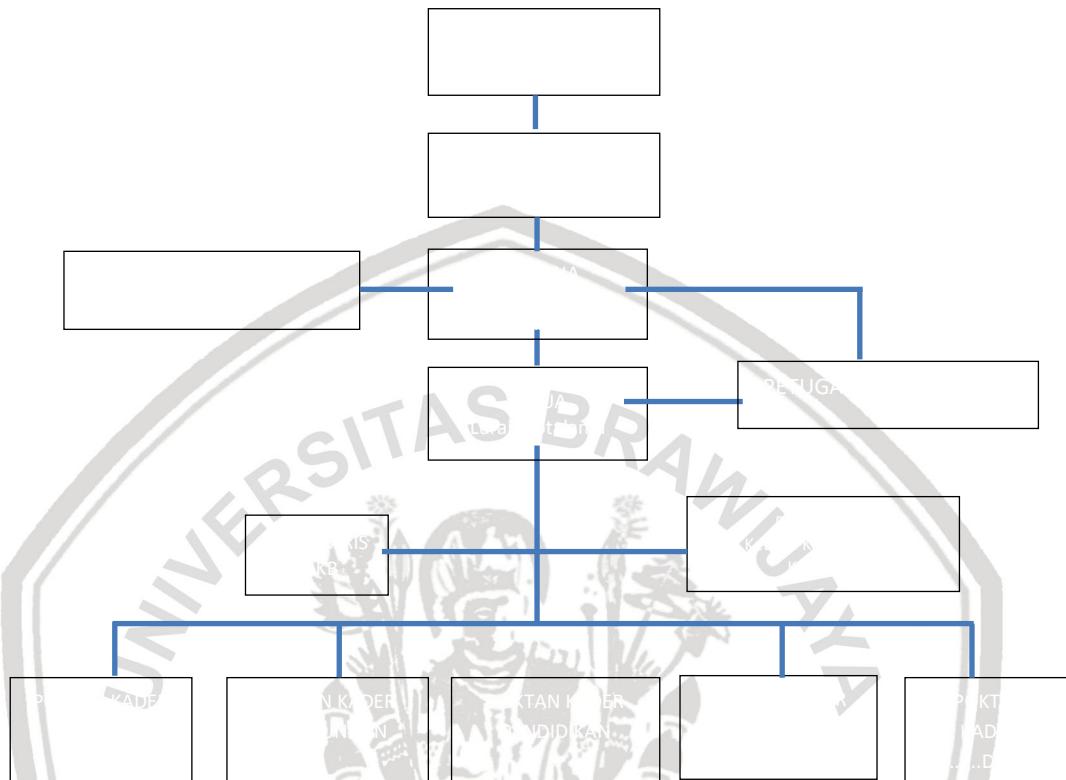
- 3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK)

4.1.6 Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Kotalama

Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang terdiri atas:

1. Pelindung : Walikota Malang
2. Penasehat : Kepala DP3AP2KB Kota Malang
3. Pembina : Camat Kedungkandang
4. Ketua : Lurah Kotalama
5. Sekretaris : PLKB
6. Bendahara : Ketua PKK Kelurahan Kotalama
7. Pelaksana Operasional : PKB/PLKB, Kader, PPKBD/Sub PPKB

Bagan 4.2



Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Sebagai legalitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB, maka Kepengurusan Kampung KB disahkan oleh Walikota Malang dengan dibuatnya Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/192/35.71.112/2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Malang. Kemudian untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di Kampung KB, rapat-rapat koordinasi secara rutin dilaksanakan dan segala perkembangan baik dari sisi realisasi kegiatan maupun rencana pengembangan kegiatan dikoordinasikan melalui forum musyawarah.

Selain itu, hal-hal terkait koordinasi kemitraan lintas sektor (instansi pemerintah dan swasta) ditindaklanjuti melalui rapat-rapat koordinasi Poktan Kader (per-bidang masing-masing) untuk kemudian dilaporkan secara rutin kepada pembina sebagai bahan evaluasi guna pelaksanaan kegiatan berikutnya serta sebagai salah satu bahan perencanaan pengembangan kegiatan yang akan datang.

4.1.7 Tahapan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kotalama

Pembentukan Kampung KB diawali dengan penyiapan beberapa hal di bawah ini sebagai kelengkapan awal Perwakilan BKKBN Provinsi setelah suatu wilayah telah ditentukan sebagai lokasi Kampung KB sesuai kriteria pembentukan Kampung KB di atas. Hal-hal yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun komitmen sebagai langkah awal

Pembentukan Kampung KB di Kelurahan Kotalama perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan operasional. Pada dasarnya hakekat membangun komitmen adalah untuk menjadikan Kampung KB sebagai program/kegiatan yang menjadi urusan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan.

Dukungan dan komitmen Walikota Malang , Kepala DP3AP2KB Kota Malang , Camat, Kepala Lurah, LPMK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK, Kader dan Bidan Wilayah merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan

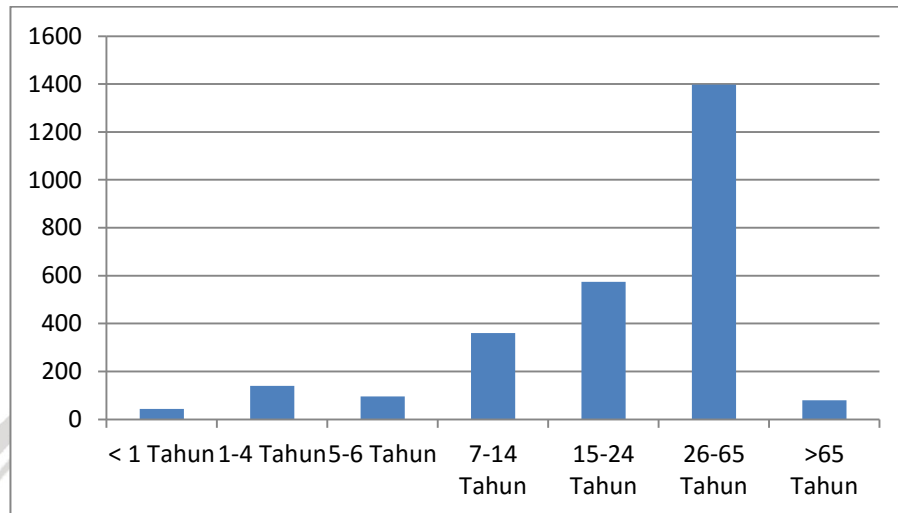
kegiatan kampung KB. Langkah awal ini dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi melalui berbagai forum.

2. Penyusunan Profil Wilayah Sebagai langkah awal

DP3AP2KB Kota Malang menyiapkan profil wilayah Kelurahan Kotalama yang ditetapkan sebagai Kampung KB di Kota Malang untuk dilaporkan kepada Walikota Malang dan Perwakilan BKKBN Provinsi, yang terdiri dari:

- a. Luas dan letak Geografis wilayah kelurahan Kotalama yang akan diusulkan menjadi kampung KB
- b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB Kotalama dipilih berdasarkan wilayah padat penduduk, serta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bantaran rel kereta.
- c. Data demografi wilayah Kampung KB yang meliputi: Jumlah Penduduk (per Kelompok Umur), Jumlah KK, Tingkat pendidikan, dll.

Diagram 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kampung KB Kotalama

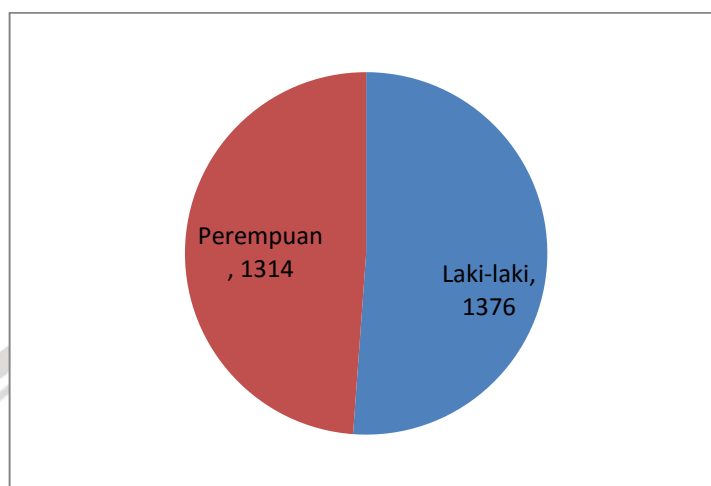


Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Dari diagram 4.1 diatas, jumlah penduduk paling banyak yakni usia 26-65 tahun yang dikategorikan usia produktif dengan jumlah 1398 jiwa. Selanjutnya diikuti usia 15-24 tahun yang dikategorikan usia remaja dewasa dengan jumlah 574 jiwa, selanjutnya usia 7-14 tahun yang dikategorikan remaja muda dengan jumlah 360 jiwa, usia 1-4 tahun dengan kategori usia balita yang berjumlah 140 tahun disusul usia 1-4 tahun dengan kategori kemas, >65 tahun dengan kategori lansia dan <1 tahun kategori usia bayi.

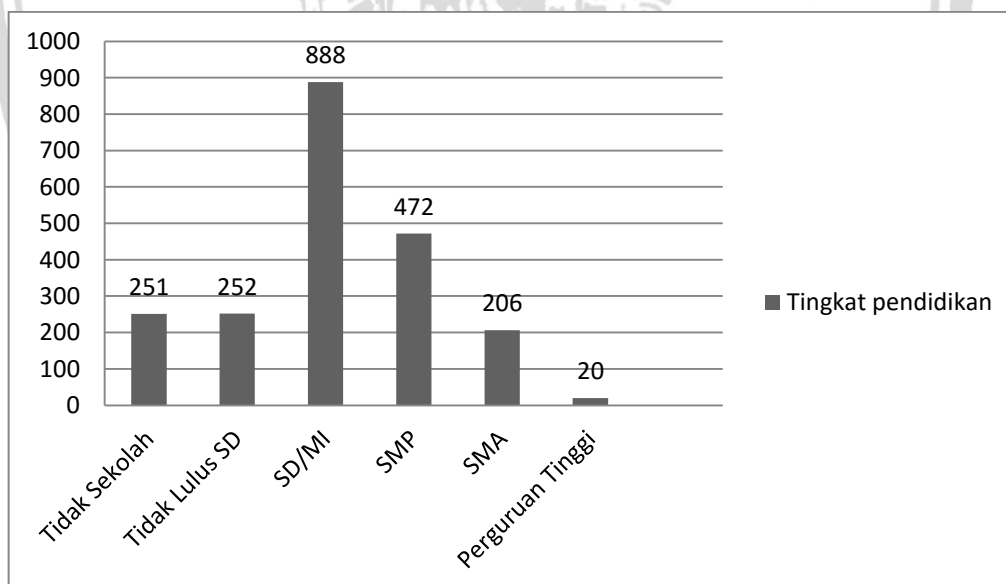
Jumlah penduduk di Kampung KB Kotalama sebanyak 2690 jiwa dengan jumlah laki-laki 1376 jiwa dan perempuan berjumlah 1314 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 741 KK. Sebagaimana dicantumkan dalam diagram 4.2 dibawah ini :

Diagram 4.2
Jumlah KK dan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kampung KB
Kelurahan Kota Lama Tahun 2016



Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Diagram 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung KB Kotalama Tahun 2016



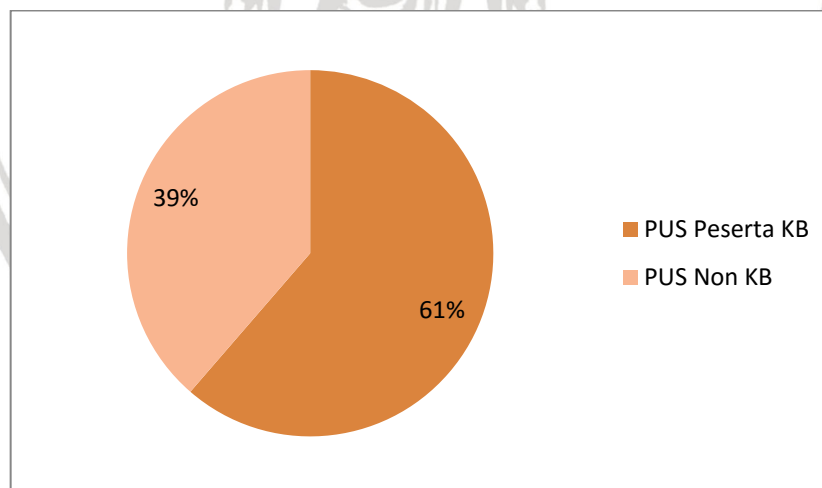
Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Dari diagram 4.3 diatas, tingkat pendidikan masyarakat di Kampung KB Kotalama mayoritas lulusan SD sebanyak 888 orang.

Kemudian yang tidak bersekolah sebanyak 251 orang , hanya selisih satu orang dengan pendidikan SD. Jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan SMP di wilayah tersebut lebih tinggi dari masyarakat yang menempuh jenjang SMA, dimana jumlah orang yang menempuh jenjang SMP sebanyak 472. Sedangkan yang menempuh perguruan tinggi hanya 20 orang. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kampung KB kotalama sangat rendah, dimana presentase penduduk lulusan SD lebih banyak yakni 42,5 %.

- d. Data Keluarga Berencana, antara lain: Jumlah PUS, Jumlah PUS yang berKB, Jumlah PUS bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi), dll.

Diagram 4.4
Jumlah PUS di Kampung KB Kotalama Tahun 2016

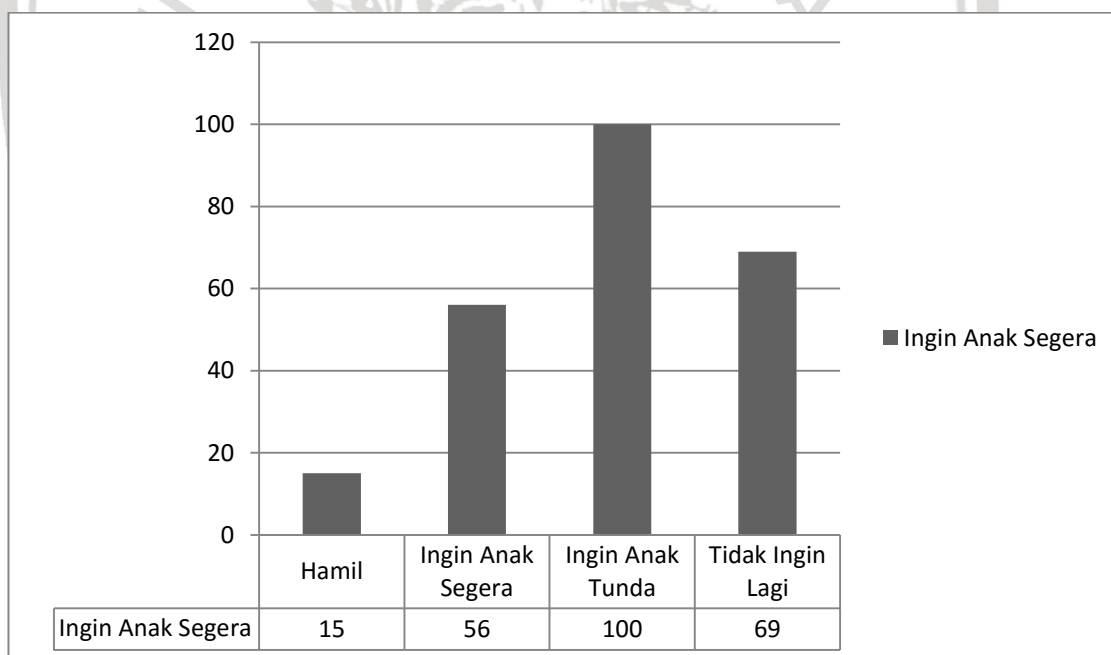


Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Pasangan Usia Subur adalah laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri yang usianya antara 15 tahun sampai 49 tahun. PUS sebagai kelompok potensial menjadi peserta KB pada usia 15-49 tahun

menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan, PUS juga dikategorikan menjadi kelompok Ingin Anak Tunda (IAT), Hamil, dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Bahkan ada PUS juga yang tidak menggunakan alat kontrasepsi atau bukan peserta KB. Jumlah PUS di Kampung KB Kotalama sebanyak 621 yang terdiri dari 381 PUS peserta KB dan sisanya 240 PUS non peserta KB dan pada tahun 2017 Jumlah PUS yang ada di Kampung KB Kota Lama didominasi usia 35-39 tahun sebanyak 110 PUS.

Diagram 4.5
PUS Unneed Meet Kampung KB Kota Lama Tahun 2016



Sumber : Olahan Peneliti, 2018

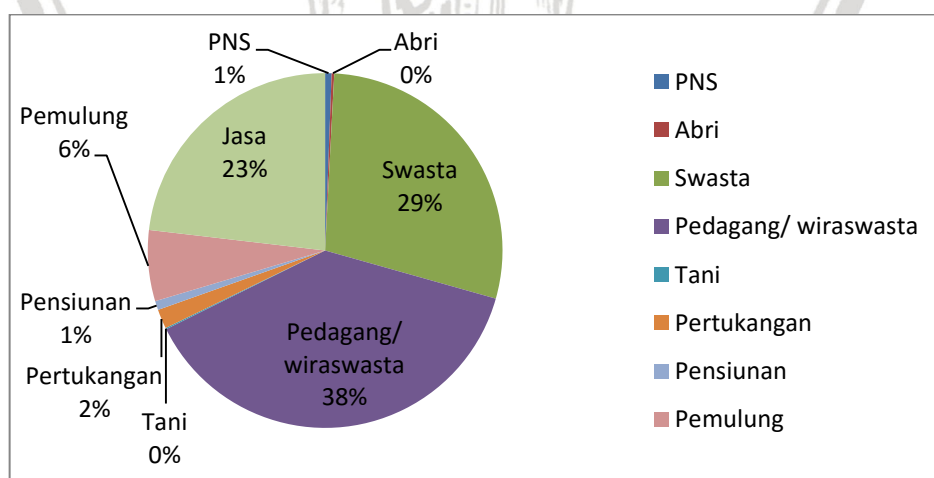
Dari diagram 4.5 Jumlah PUS Unmet Need di Kampung KB Kotalama berjumlah sebanyak 240 orang. Jumlah tersebut diuraikan sebanyak 15 PUS hamil dengan presentase terhadap PUS sebesar 2,42%.

Sebanyak 56 PUS ingin anak segera dengan presentase terhadap PUS sebesar 9,02%. Kemudian sebanyak 100 PUS ingin anak ditunda dengan presentase terhadap PUS sebesar 16,10%. Dan sebanyak 69 PUS tidak ingin anak lagi dengan presentase terhadap PUS sebesar 11,11%.

- e. Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data mata pencaharian, data tahapan keluarga sejahtera.

Mayoritas penduduk di Kampung KB Kotalama sebagaimana diolah dari buku monografi RW 8 Kelurahan Kotalama, jumlah pemulung di Kampung KB tersebut sebanyak 55 orang. Sedangkan yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 326 orang dan 234 orang bekerja swasta. Sedangkan di RW 8 Kelurahan Kota Lama sendiri belum memiliki kelompok usaha masyarakat. Untuk melihat data pekerjaan/ mata pencaharian penduduk di Kampung KB bisa dilihat pada Diagram 4.6 berikut ini :

Diagram 4.6
Mata Pencaharian Kampung KB Kelurahan Kota Lama



Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan dibagi menjadi Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Ciri keluarga yang termasuk indikator Pra Sejahtera atau sangat miskin adalah dibagi dua yakni ekonomi dan non ekonomi yang meliputi secara ekonomi dilihat dari untuk kebutuhan makan yang minimal tidak dua kali sehari, tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang seperti pakaian yang dipakai dalam berbagai aktivitas berbeda, lantai rumah masih berbentuk tanah dan belum ada proses pemasangan keramik atau plester. Sedangkan untuk non ekonomi yakni tidak bisa melaksanakan ibadah dalam rumah, dan tidak mampu membawa anak yang sakit ke sarana kesehatan minimal seperti puskesmas.

Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang secara ekonomi tidak dapat memenuhi indikator ekonomi seperti paling tidak seminggu sekali keluarga makan daging, ikan atau telur. Dalam waktu satu tahun seluruh anggota keluarga mendapatkan paling tidak satu pakaian baru. Lantai rumah paling tidak mendapat 8 meter untuk setiap penghuni. Untuk non ekonomi ibadah teratur, dalam tiga bulan terakhir selalu sehat, penghasilan keluarga yang tetap, usia 10-60 tahun bisa membaca dan menulis, usia 6-15 tahun sudah bersekolah. Untuk lebih lanjut jumlah KK Pra Sejahtera dan KS I di Kampung KB Kotalama akan dirincikan di Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Pra KS dan KS I di Kampung KB Kotalama

No	Wilayah	Jumlah KK	Pra KS	KS I	Jumlah Pra KS dan KS I
1	Kelurahan Kotalama	7130	923	2079	3002
2	Kampung KB Kotalama	754	168	210	378

Sumber : Olahan Peneliti, 2018

3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB Rekapitulasi profil wilayah diatas kemudian menjadi materi rapat penetapan wilayah Kampung KB. Alur penetapan wilayah sebagai berikut:
 - a. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan Walikota Malang dan Kepala DP3AP2KB Kota Malang, termasuk penetapan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pembentukan kader ini meliputi Kader Kesehatan, Kader Lingkungan, Kader Pendidikan, Kader KKBPK.
 - b. Penetapan wilayah Kampung KB Kotalama kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Kampung KB oleh DP3AP2KB Kota Malang dan disahkan melalui Surat Keputusan Walikota No. 188.45/192/35.73.112/2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Malang.

- c. Rekapitulasi wilayah Kampung KB beserta SK Struktur Organisasinya dikirimkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Kepala BKKBN dengan tembusan kepada Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat.

4. Penyediaan Data dan Informasi

Setelah wilayah Kampung KB ditetapkan dan dilakukan pembentukan/ penetapan/pencanangan wilayah tersebut sebagai Kampung KB serta telah disusun Struktur Organisasinya, maka selanjutnya DP3AP2KB Kota Malang melakukan pelengkapan Data dan Informasi Kampung KB meliputi: Jumlah jiwa dalam keluarga, Nomor kode anggota keluarga, nama, alamat, hubungan dengan KK, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. b. Data dan Informasi yang terkait dengan cacatan sipil pada lokasi Kampung KB. c. Data dan informasi Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah Kampung KB

Melalui koordinasi yang dipimpin oleh Ketua, setiap petugas lini lapangan (PLKB/PKB/TPD/PKK) agar memanfaatkan data mikro keluarga yaitu R/I/KS dan R/I/MDK serta R/I/PUS sebagai sumber untuk memahami potensi dan permasalahan yang ada di RW 8 Kelurahan Kotalama. Kemudian data mikro yang ada tersebut dipergunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk menentukan sasaran, potensi dan permasalahan baik yang berkaitan dengan program KKBPK maupun dengan Bidang lintas sektor lainnya yang dibutuhkan di wilayah Kampung KB.

4.2 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) “Nusa Indah” Kampung Keluarga Berencana Kotalama

4.2.1 Sejarah terbentuknya UPPKS “Nusa Indah”

Pembentukan kelompok UPPKS “Nusa Indah” ini dengan berlangsungnya pelaksanaan kegiatan program Kampung Keluarga Berencana. Dimana sebelum adanya program KB, masyarakat belum memiliki kelompok usaha masyarakat. Pembentukan UPPKS “Nusa Indah” ini ditandai dengan adanya Surat Keputusan Lurah Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor 400/18/3573031001/2016 pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan membentuk struktur kepengurusan kelompok UPPKS “Nusa Indah” Kelurahan Kotalama.

4.2.2 Visi dan Misi UPPKS “Nusa Indah”

4.2.2.1 Visi UPPKS

Bersama mitra kerja membangun usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

4.2.2.2 Misi UPPKS

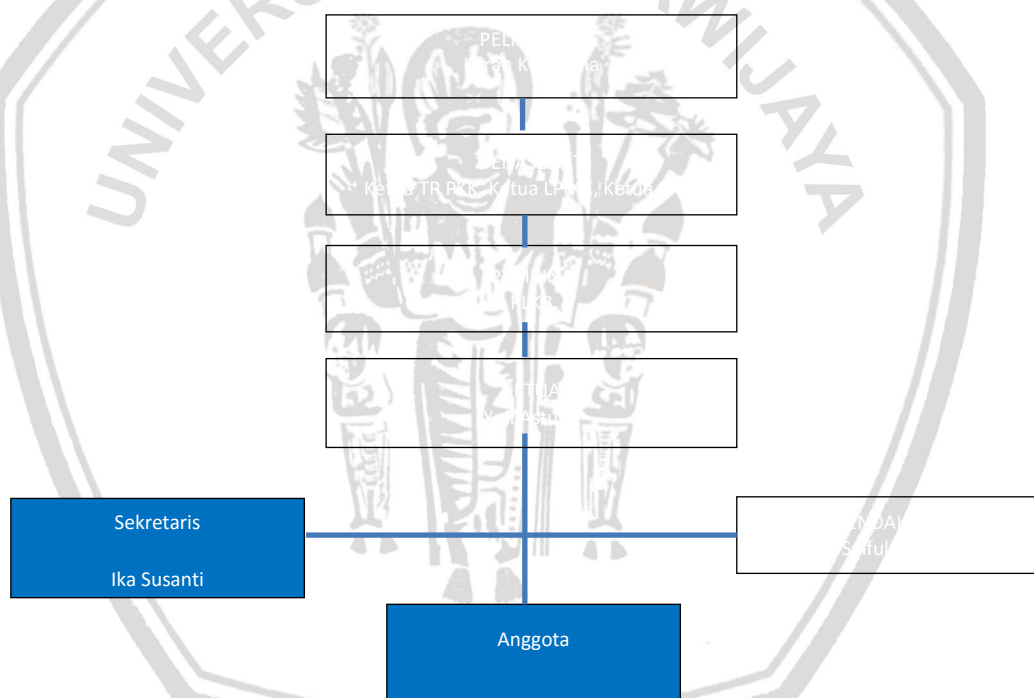
UPPKS memiliki beberapa misi, seperti berikut ini;

1. UPPKS berusaha meningkatkan peran serta mitra kerja dalam kegiatan usaha mikro.
2. UPPKS berusaha mengembangkan usaha mikro melalui kegiatan kelompoknya.
3. UPPKS berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga.
4. UPPKS berusaha membina kesertaan dan kemandirian ber-KB anggota kelompoknya.

4.2.3 Struktur Kepengurusan Kelompok UPPKS “Nusa Indah” Kampung Keluarga Berencana Kotalama

Struktur kepengurusan kelompok UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB Kotalama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor 400/18/3573031001/2016 pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana digambarkan pada Bagan 4.2 dibawah ini :

Bagan 4.4
Struktur Kepengurusan UPPKS “Nusa Indah”



Sumber : Surat Keputusan Lurah Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor 400/18/3573031001/2016

4.2.4 Anggota Kelompok UPPKS “Nusa Indah”

Jumlah anggota UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB Kotalama ini berjumlah 17 orang. Dari 17 anggotayang tergabung dalam kelompok ini, jenis

usaha yang dijalankan bergerak dalam industri rumah tangga dengan berbagai produk usaha, diantaranya seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Anggota Kelompok UPPKS “Nusa Indah” Tahun 2018

No	Nama Kelompok UPPKS	Jenis Usaha	Produk Usaha
1	NUSA INDAH Nama Anggota : 1. Yuli Astutik 2. Ika Susanti 3. Titin 4. Edi Suwondo 5. Fauzi 6. Saiful Bahri 7. Romlah 8. Lina 9. Supartiyah 10. Mustofa 11. Sri Mulyati 12. Abd Halim 13. Sundari 14. Mani 15. Sutinah 16. Nanik 17. Bunide 18. Erna 19. Taufik 20. Hambali	Home Industry	Bumbu Pecel, Souvenir Kampung KB Kain Perca Kue Basah Mebel Sablon dan Souvenir Kampung KB Sablon Doos Lamaran Gorden Jamu Herbal Konveksi Bawang Goreng Salad Buah Sempol Tas Bawang Goreng Prancangan Kerajinan Kaset Pangsit Sangkar Burung Sangkar Burung

Sumber : Data Laporan Kelompok UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB Kotalama

Dari jumlah peserta UPPKS yang usahanya terdaftar dalam data laporan kelompok sebanyak 20 jenis usaha berbasis *home industry*. Sasaran dari kelompok UPPKS yang ada di Kampung KB difokuskan pada keluarga prasejahtera baik peserta KB atau bukan peserta KB yang belum memiliki usaha. Sedangkan untuk bergabung atau syarat kelompok UPPKS adalah masyarakat

yang memiliki usaha. Di Kampung KB Kota Lama sendiri yang menjadi produk unggulan adalah bawang goreng dan bumbu pecel yang menjadi andalan masyarakat kampung KB dalam setiap kegiatan rutin baik gelar produk maupun bazar. Selain itu adapun produk yang dikembangkan saat ini yaitu pembuatan camilan, aplikasi seperti kerajinan kain perca dan souvenir kampung KB.

4.2.5 Payung Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor ; 15/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ, Tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/9365/012.4/2017, Tentang Dukungan Lintas Program/ Lintas Sektor pada Kampung KB di Jawa Timur.
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa timur Nomor 188/236/KPTS/013/2017, Tentang Kelompok Kerja Integrasi Program Pembangunan Lintas Sektor dalam Kampung .
7. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/192/35.73.112/2017, Tentang Kelompok Kerja Kampung KB Kota Malang Keluarga Berencana Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.
8. Surat Keputusan Lurah Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor 400/18/3573031001/2016.

BAB V

PEMBERDAYAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA PADA PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

5.1 Bentuk Pemberdayaan UPPKS Kampung Keluarga Berencana Kotalama

Pada bab ini membahas secara mendalam mengenai bentuk pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung KB Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB Kotalama ini ditinjau dari konsep pemberdayaan masyarakat menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000), yaitu bantuan modal, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan. Berikut penjelasan lebih lanjut yang akan dibahas dalam sub bab dibawah ini.

5.1.1 Bantuan Modal

Bantuan modal merupakan suatu usaha yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu suatu masyarakat dalam mengembangkan suatu usaha ataupun membuka suatu usah baru. Dalam hal ini masyarakat di Kampung KB Kotalama memperoleh bantuan dana dari pihak pemerintah untuk menjalankan program UPPKS dalam kaitannya mengangkat tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Kampung KB Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Secara materi sendiri terhadap kegiatan Kampung KB di Kotalama, dana secara murni berasal dari pemerintah melalui DAK yang berasal dari APBN.

Anggaran yang dialokasikan pada masing-masing Kampung KB di Kota Malang hanya Rp.20.000.000. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sedangkan untuk dana poktan UPPKS hanya Rp.3.000.000 yang dipergunakan untuk kegiatan penyuluhan . Jumlah tersebut sangatlah minim untuk dipergunakan dalam kegiatan. Sehingga untuk menambah modal kepada masyarakat, pengurus kelompok dan PLKB berinisiatif mengembangkan kegiatan simpan pinjam untuk poktan UPPKS yang diadakan melalui kegiatan PKK.

Modal awal untuk UPPKS ini Rp.3.500.000 yang bersumber dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Sehingga masyarakat yang menginginkan pinjaman modal untuk usaha dapat terbantu melalui modal yang diberikan oleh PKK. Anggota UPPKS yang membutuhkan modal akan diberikan pinjaman oleh PKK sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Untuk usaha mikro, hanya diberikan pinjaman sebanyak Rp.1.000.000. Untuk pengembaliannya dapat diangsur sepuluh kali dengan bunga 1%. Bunga yang didapat akan dimasukkan ke dalam kas. Seperti yang disampaikan oleh Ketua kelompok UPPKS “Nusa Indah”, sebagai berikut :

“jadi untuk bantuan modal usaha masyarakat itu, saya mengembangkan simpan pinjam. Jadi yang mau usaha tapi nggak ada modal itu nanti dikasih modal. Modalnya dari mana ? ya dari PKK. Jadi setiap pertemuan nanti anggotanya kumpul, siapa yang mau pinjam ya dikasih. Tapi dikasihnya disesuaikan dengan jenis usahanya. Simpan pinjam ini inisiatif dari kelompok mbak, saya sampaikan ke Bu Dina. Bu Dina nya setuju. Jadi kalau ada simpan pinjam kan untungnya nanti kalau kita kedatangan tamu, bisa buat beli kue atau masuk kas kan enak, jadi nggak merepotkan PLKB nya.”¹

¹ Wawancara Yuli Astutik, *Op.Cit*

Simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat merupakan inisiatif dari anggota UPPKS “Nusa Indah” yang dibantu oleh PKK untuk memberikan modal awal untuk membuka suatu usaha. Adapun dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat dituntut untuk bisa memaksimalkan dan pinjaman tersebut oleh sebab itu diperlukan adanya pendampingan dan juga arah pemasaran produk yang jelas.

Bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB Kota Malang hanya memberikan bantuan berupa fasilitas pengelolaan, pembentukan, dan pengembangan karena untuk dana materiil Kampung KB, BKKBN yang berhak memfasilitasi. Sedangkan saat ini untuk bantuan dana hibah tidak diperkenankan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sapto :

“dalam membentuk kita memfasilitasi berupa sosialisasi, mengelola ya kita bantu dalam pengelolaannya seperti apa. Kalau untuk pendanaan kita tidak memberi kepada masyarakat, hanya memfasilitasi berupa kegiatan berbentuk pelatihan, dengan memberikan jalan. Oh.. ini lo ada satu lembaga institusi yang membiayai, artinya seperti dari dinas provinsi BKKBN, memberikan simpan pinjam yang bersifat lunak, kalau untuk fasilitas dana itu kita tidak diperbolehkan, maupun berupa barang . Itu terkait UU No 23 Tahun 2014, jadi untuk pelatihan itu fasilitas yang kita berikan baik dari provinsi. Kayak kemarin itu dapat bantuan dari provinsi alat pengepress-an . Itu yang boleh memberikan ya dari provinsi.”²

Sedangkan untuk bantuan modal dari pemerintah terkait kegiatan UPPKS sendiri hanya berupa bantuan alat-alat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh kelompok bukan perorangan. Pemerintah melakukan pemetaan, apa yang masyarakat butuhkan kemudian diusulkan ke provinsi. Selanjutnya provinsi yang

² Wawancara dengan Bapak Sapto Wibowo selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Malang pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 09.44 WIB

memberikan pengadaan alat-alat seperti alat pengepres-an yang memang sudah diusulkan sebelumnya oleh ketua kelompok UPPKS “NUSA INDAH” untuk pelatihan pembuatan minuman kemasan.

Dana yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya sudah sangat membantu masyarakat dalam melakukan poktan UPPKS. Akan tetapi kurangnya bantuan dana dari pihak pemerintah menjadikan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*. *Bottom up* merupakan pemberdayaan yang terbentuk dari ide-ide masyarakat sendiri karena pemberdayaan yang sebelumnya bersifat *top down*. Bantuan dari pemerintah tersebut kurang maksimal dalam pelaksanaan program KB di Kampung Kotalama. Oleh sebab itu masyarakat harus mempunyai inisiatif tersendiri dalam memaksimalkan dana yang ada seperti contoh pelatihan pembuatan kemasan yang di gagas oleh ketua kelompok UPPKS “Nusa Indah”.

Bantuan dana yang diberikan oleh pihak pemerintah memang terbilang sangat minim akan tetapi dengan cara-cara pendampingan yang intensif dapat memaksimalkan bantuan dana tersebut, semisal yang semulanya masyarakat hanya menggunakan cara-cara tradisional dalam menjalankan suatu usaha akan tetapi dengan adanya pendampingan-pendampingan dari pihak yang sudah berpengalaman masyarakat bisa merangsang ide-idenya untuk melakukan usaha-usaha yang lebih inovatif.

5.1.2 Bantuan Pendampingan

Kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan UPPKS berupa pelatihan maupun pembinaan kepada masyarakat baik anggota yang tergabung

UPPKS maupun masyarakat diluar anggota UPPKS yang Pra KS maupun KS I. Pelatihan yang diberikan dilakukan setahun sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Endang seperti berikut :

“itu pelatihan satu tahun sekali, tapi pelatihan itu tidak keseluruhan, yang mereka mempunyai usaha apa ? itu kita bina, kita panggil. Kalau mereka yang belum mempunyai usaha, juga kita berikan keterampilan, supaya mereka mampu untuk mendapatkan penghasilan dari keluarga”.³

Sasaran utama pelatihan UPPKS sendiri yaitu masyarakat yang Pra KS, yang tidak punya usaha maupun yang punya usaha. Tetapi mereka yang mengikuti program KB, sehingga sasaran utama UPPKS sendiri ditujukan untuk masyarakat peserta KB yang prasejahtera baik yang belum memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan UPPKS sendiri dilakukan dengan memberikan motivasi dan memberikan informasi terkait usaha melalui seminar maupun pertemuan-pertemuan. Tidak hanya bentuk motivasi saja, melainkan pelatihan diberikan rutin setahun sekali seperti pelatihan memasak membuat coklat, gorengan, kue basah untuk bekal ibu-ibu mengembangkan usaha *home industry* :

“jadi ketika ada pertemuan atau seminar, kita menghadirkan akademisi dari brawijaya FEB itu terkait bagaimana mengelola usaha, memilih usaha, dan menjalankan usaha baik dari pemasarannya. Nah itu kita berikan motivasi kepada masyarakatnya.”⁴

³ Wawancara Endang Purwati, *Op.Cit*

⁴ Wawancara Sapto Wibowo, *Op.Cit*

Gambar 5.1
Kegiatan Workshop UPPKS Tahun 2018



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018

Kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah melalui DP3AP2KB Kota Malang kepada kelompok UPPKS Kampung KB disampaikan oleh Ibu Endang seperti berikut :

“dan dari dinas kita mbak, karena itu juga baru terbentuk ya, kita pembinaanya ke UPPKS yang baru terbentuk itu kita mengadakan pelatihan, binaan untuk mereka. Terus setelah mereka dibina, mereka kadang-kadang itu juga produknya di tawarkan ke sini. Jadi setiap kali ada pembinaan, entah itu pelatihan yang bisa meningkatkan usaha pendapatan keluarganya mereka pasti kita undang dalam kegiatan pelatihan. Jadi setelah dilatih, kita monitor. Kalau ada pameran mereka kita ajak. Ataupun misalkan kemarin itu ada dalam rangka HUT Kota Malang kita mengadakan gebyar dari UPPKS yang ada itu kita berkesempatan mengadakan pameran bazar UPPKS se-Kota Malang. Jadi UPPKS kelurahan yang sudah berdiri sebelumnya, dengan UPPKS Kampung KB yang baru terbentuk itu kita jadikan satu untuk mempromosikan produknya masing-masing.”⁵

⁵ Wawancara Endang Purwati, *Op.Cit*

Gambar 5.2
Kegiatan Pelatihan Memasak yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB
Kota Malang



Sumber : Draft Otonomi Award Kampung KB Kotalama

Kegiatan pelatihan dari DP3AP2KB sendiri lebih memprioritaskan Kampung KB, mengingat Kampung KB merupakan program baru yang terbentuk sejak 2016, sehingga UPPKS yang bergerak di Kampung KB juga masih baru terbentuk dan membutuhkan pendampingan yang maksimal. Kegiatan pelatihan hanya dilakukan setahun sekali dan dilakukan bebarengan dengan UPPKS bentukan kelurahan. Dari Kampung KB sendiri diajukan lima orang untuk mengikuti pelatihan, diprioritaskan masyarakat prasejahtera seperti janda atau pemulung pengemis yang ada di Kampung KB Kotalama. Kegiatan pelatihan seringkali dilakukan di hotel mengingat jumlah anggota UPPKS yang ada di Kota Malang cukup banyak.

Dari beberapa informasi yang didapat, peneliti berpendapat bahwa kegiatan pelatihan di Kampung KB masih dinilai sangat minim. Pelatihan hanya berlangsung dua kali sejak terbentunya Kampung KB. Sedangkan untuk membina masyarakat Kampung KB dibutuhkan progress secara bertahap. Mengingat kondisi masyarakat Kampung KB yang terbelakang baik dari pendidikan, maupun sosial ekonomi masyarakat perlu dikembangkan. Apalagi merubah kebiasaan masyarakat Kampung KB Kotalama untuk meninggalkan budaya mengemis maupun memulung bukan hal yang mudah. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mendalam terkait UPPKS ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kampung KB Kotalama serta memfasilitasi masyarakat dengan membekali pelatihan-pelatihan secara intensif.

Peneliti berpendapat bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah guna mensejahterakan masyarakat masih tidak efisien, dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan hanya satu tahun sekali, hal ini mengakibatkan kurangnya pemerataan pelatihan kepada masyarakat yang mengikuti KB, dimana seharusnya pendampingan pelatihan yang dilakukan oleh pihak yang terkait yakni oleh pemerintah maupun *stakeholder* harus dilakukan berkali-kali. Karena apabila pendampingan pelatihan dilakukan hanya satu kali dalam kurun waktu setahun sangat tidak efisien. Pendampingan tersebut merupakan suatu upaya untuk mengontrol dan membenjemen pengusaha agar mendapatkan hasil yang maksimal, apabila suatu pendampingan hanya beberapa kali dalam kurun waktu yang sangat panjang membuat masyarakat tidak terkontrol dalam melakukan pengembangan usaha.

Peran penting dengan adanya pendampingan tersebut masyarakat dibimbing dan dituntut untuk mempunyai suatu ide atau gagasan baru yang lebih inovatif agar dalam memasarkannya tidak tertumpu pada satu kelompok konsumen saja akan tetapi untuk kalangan yang lebih luas. Pendampingan ini merangsang masyarakat agar mempunyai keinginan yang lebih luas dalam mengembangkan usaha dan memaksimalkan modal usaha yang ada.

Sehingga kedepannya pihak DP3AP2KB perlu melakukan pelatihan strategi dan *marketing* bisnis yang memanfaatkan promosi produk melalui media sosial. Diharapkan dengan semakin canggihnya teknologi dan ikut berpacu mengikuti perkembangan pasar, produk-produk yang telah dihasilkan melalui berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan bisa dipasarkan dengan mudah. Selain pelatihan, DP3AP2KB harus mempertegas tupoksi dari PLKB, selain memiliki tugas penyuluhan juga harus memiliki keterampilan dalam memberikan pelatihan sebagai tindak lanjut dari proses pelatihan sebelumnya agar terus berkesinambungan. Melihat tupoksi dari PLKB selama ini sangat strategis yang gesekan langsung dengan lingkungan anggota UPPKS.

5.1.3 Penguatan Kelembagaan

Aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah penguatan kelembagaan merupakan suatu usaha masyarakat untuk melindungi dan memwadahi masyarakat dalam pembentukan kelompok usaha. Baik berupa lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat. Fungsi dari keberadaan lembaga tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan

kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat ini mempunyai beberapa fungsi seperti memberikan pedoman bagi anggota masyarakatnya dalam melakukan usaha, bagaimana mereka harus bertindak laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah usaha sehari-hari terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan, dan memberikan pedoman dan pelatihan kepada masyarakat dalam melakukan sistem usaha yang baik. Adanya kelembagaan ini diharapkan dapat mendukung para organisasi masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan usahanya dan memperkuat fungsi internal, kinerja, dan keberlanjutan dari usaha pemberdayaan yang sedang berjalan.

Penguatan kelembagaan perlu dilakukan supaya visi dan misi serta program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Penguatan lembaga bisa melalui berbagai cara, mulai dari bagaimana cara koordinasi antar lembaga hingga koordinasi dan komunikasi antar stakeholder yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Terutama stakeholder yang ada di dalam struktur UPPKS “NUSA INDAH” hingga lembaga di atasnya setingkat kelurahan hingga kedinas terkait. Penguatan kelembagaan pertama bisa melalui proses pengusulan program kerja dari instansi terkait dan bisa dari masukan instansi lain. Seperti yang diungkap oleh Pak Sapto sebagai berikut :

“Sekretariat UPPKS dalam hal ini kopwan AKU itu ada di kantor kami. Jadi penguatan kelembagaan bisa melalui usulan program, mereka setiap

tahun mengadakan RAT kemudian tetap dibawah pimpinan dinas dalam hal ini terkait dengan rencana programnya kalo kita lihat UPPKS di Kota Malang ini ada yang tergabung dengan kopwan AKU, ada yang tidak. Tapi kita arahkan mereka masuk menjadi peserta anggota kopwan AKU. Jadi dari bidang pengolahan, sampek ke pemasarannya itu kita fasilitasi.”⁶

Menurut Pak Sapto penguatan lembaga bisa didasari dari pengusulan program yang melibatkan berbagai lembaga. Dengan perumusan program untuk kampung KB maka akan lebih mudah dalam menentukan siapa saja dinas atau lembaga terkait yang memiliki tupoksi dalam mengembangkan pemberdayaan kampung KB.

“Nah untuk semua SKPD itu terlibat. Meskipun itu nggak jelas. Semua itu kan *nggak iso sak det sak nyet* (tidak bisa langsung terwujud). Seperti PU terkait pembangunan infrastruktur-nya, kemudian dinas kesehatan itu mereka sebetulnya terlibat. Tapi semua itu kan terkait anggaran. Harapanya kampung KB itu semua *stakeholdernya* itu masuk. Cuma ya permasalahan nya itu ada satu ego. Kita koar-koar memberangkatkan OPD nya. Bagaimana pelaksanaannya ? contohnya dari kita itu menyuruh dinas kesehatannya gerak, kita nggak bisa, siapa yang berhak ? ya tingkat sekda. Mereka yang bisa menunjuk dinas ini itu untuk menggarap kampung KB”.⁷

Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam penguatan kelembagaan di program Kampung KB ini tidaklah mudah menurut Pak Sapto, karena berkaitan dengan anggaran dalam pelaksanaan program kerja. Selain dari beberapa kelembagaan kedinasan yang menjadi acuan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan justru harus lebih solit di bagian kelurahan karena setiap *stakeholder* yang berada di bawah akan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang berada di Kampung KB. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dina terkait kersama antar lembaga di Kelurahan, sebagai berikut :

⁶ Wawancara Sapto Wibowo, *Op.Cit*

⁷ *Ibid.*

“Kalau pokja kelurahannya enak. Jadi sekarang saya merasakan bahwa saya baru tersentuh berapa tahun itu. Dari 2016 kan Kampung KB. Oh ternyata masyarakat itu seperti gini ,Kampung KB ternyata nggak hanya KB. Wilayahnya dibikin bagus, masyarakatnya sudah ada kesadaran, tapi belum menjangkau semuanya sih. Jadi kerjasama antar individu di dalam kelompok UPKS itu masih belum baik. Tapi menurut saya sama. UPPKS dimana pun itu mereka kebanyakan siapa yang punya usaha individu tapi digabung ke dalam satu kelompok. Yang saya tahu itu di Mergosono juga belum ada usaha bersama ,yang ada mereka usaha sendiri-sendiri tapi disatukan dalam satu kelompok.”⁸

Pokja kelurahan selalu memberikan fasilitas yang memadai dalam memberdayakan UPPKS, selain itu kerjasama kelompok dan individu juga berjalan dengan baik. Tetapi program di Kampung KB itu tidak hanya UPPKS dalam penguatan kelembagaan ini banyak memiliki kendala tersendiri. Seperti UPPKS yang harus menggerakkan anggotanya, dimana saat ini partisipasi UPPKS Kampung KB Kotalama menjadi kendala tersendiri karena masyarakatnya yang apatis dan enggan untuk aktif dalam kegiatan UPPKS. Komunikasi antar *stakeholder* sudah baik, baik antara UPPKS terhadap PLKB dan komunikasi PLKB sebagai penyuluh terhadap lembaga di atasnya baik kelurahan dan dipihak DP3AP2KB juga baik. Hanya saja penguatan kelembagaan ini terhalang oleh satu hal yaitu partisipasi masyarakat yang minim di wilayah Kotalama yang membuat proses pelaksanaan program kerja menjadi lamban.

Meski penguatan kelembagaan sudah dilakukan dengan cara koordinasi antar lembaga, menurut peneliti masih kurang maksimal salah satunya UPPKS “Nusa Indah” yang tidak tergabung di dalam Asosiasi AKU. Padahal AKU berpotensi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi anggota yang tergabung dalam UPPKS “Nusa Indah”. Padahal anggota dan ketua sudah

⁸ Wawancara Tri Dina Mikarini, *Op.Cit*

memahami keberadaan AKU dan mengetahui manfaat yang mereka dapatkan saat bergabung nampaknya kurang menarik perhatian dari anggota dan ketua UPPKS “Nusa Indah” hal itu menjadi kendala karena faktor personal individu masing-masing. Seperti ketua yang kurang inisiatif dan anggota yang justru sibuk dan memilih mengurus usahanya dari pada bergabung dengan AKU.

5.1.4 Penguatan Kemitraan

Penguatan kemitraan bertujuan dalam mengelola sebuah program agar lebih berkelanjutan dan optimal dalam pelaksanaan. Kemitraan dapat dilakukan bersama *stakeholder* atau Pemerintah dengan kelompok yang berkaitan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa partisipan yang terkait ada yang aktif maupun pasif. Ketika partisipan pasif, maka masyarakat butuh kemitraan kembali yang lain. Kemitraan yang banyak dapat mempengaruhi kelembagaan maupun kelompok yang melakukan pemberdayaan memaksimalkan program seperti menarik aktif partisipan yang pasif. Pemberdayaan *bottom-up* adalah pemberdayaan yang terbentuk dari inisiatif ide ide masyarakat untuk lingkungannya. Masyarakat memang harus mengeksploitasi ide mereka dalam melakukan kemitraan demi membangun pemberdayaan yang efektif.

Penguatan kemitraan di Kampung KB Kotalama masih belum terjalin kerjasama dengan pihak *stakeholder*, sesuai hasil wawancara dengan ketua UPPKS mengatakan bahwa:

“kita hanya menjaring yang ibu-ibu saja , yang usaha-usaha kecil dikumpulkan jadi satu. Seumpama nanti ada acara dimana...ada acara Kampung KB seperti gelar produk itu kita ngambil dari warga-warga. Jadi

kemampuannya Kampung KB itu ya brambang goreng, trus kemarin pecel, bandeng presto, terus pisang yang sekarang lagi musim itu lo mbak..yang isinya coklat, greentea greentea itu lo (pisang nugget). usaha kecil-kecilan mbak, menyentuh warga itu angel lo, bener lo, seng jarene bu lurah iku “*duh cek angele ngajak warga iki*”. Tapi kan bu lurah nggak kelapangan, cuma di kantor aja. Yang langsung kader ini.”⁹

Kemitraan yang seharusnya dilakukan oleh pihak UPPKS masih belum maksimal karena keterbatasan jaringan dan pengalaman kerja yang kurang dari pihak UPPKS. Pihak UPPKS hanya mengandalkan warga setempat seperti ibu-ibu untuk memasarkan hasil produksi dan juga dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat Kampung KB setempat, sedangkan kebanyakan warga setempat juga berpenghasilan rendah, oleh karena itu pemasaran produk hasil masyarakat seolah-olah hanya jalan ditempat.

Pelaksanaan Kampung KB di Kotalama sendiri juga belum melibatkan LSM/ swasta. Padahal apabila ada keterlibatan LSM dapat membantu dalam proses pembedaman. Seperti yang diketahui pula, selama ini pelimpahan tugas lebih dititik beratkan kepada Bu Dina selaku PLKB yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat :

“kalau LSM nggak mbak, jadi kita hanya naungan dari BKKBN Provinsi. Kalau untuk non pemerintah kita enggak. Kampung KB itu di dalamnya ada PLKB. Nah PLKB itu penyuluhnya. Dibawah Ka UPT.”¹⁰

Poktan UPPKS di Kampung KB ini seharusnya dalam pelaksanaannya melibatkan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) yang merupakan perkumpulan UPPKS se-Kota Malang yang masih dibawah naungan DP3AP2KB Kota Malang. AKU merupakan bentukan koperasi wanita yang perannya menghimpun

⁹ Wawancara Yuli Astutik, *Op.Cit*

¹⁰ Wawancara Endang Purwati, *Op.Cit*

kelompok UPPKS yang tergabung didalamnya sebagai wadah kelompok UPPKS untuk *sharing* terkait usaha bagaimana permodalan dan pemasarannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Endang Purwati :

“ Kita itu ada dari UPPKS itu kita bentuk assosiasi namanya AKU. Itu gabungan dari seluruh UPPKS yg ada di Kota Malang. Nah jadi dengan adanya koperasi wanita ini mereka bisa *sharing* mbak kalau pameran-pameran apa-apa, mereka juga diajak. Misalkan mereka ada kendala dengan masalah permodalan, bisa ikut simpan pinjam. Nah kesulitannya kalau mereka itu tidak ikut asosiasi dan tidak tercover dalam dinas kami, kami juga mau membina agak sulit, mau mintakan pelatihan juga sulit, ya akhirnya dampaknya usahanya kadang mati kadang ikut.”¹¹

Berdasarkan informasi dari Ketua AKU Kota Malang Ibu Djuwartriningsih, kelompok UPPKS yang ada di Kampung KB belum ada yang tergabung dalam AKU. Menurut pernyataan beliau, belum tergabungnya kelompok UPPKS Kampung KB dalam asosiasi mereka dikarenakan minimnya sosialisasi terkait AKU sebagai wadah berkumpulnya kelompok UPPKS yang ada di Kota Malang.

“sosialisasinya ke Kampung KB-nya belum pernah sama sekali. Dari enam wilayah di Kota Malang belum. Kita belum diminta untuk sosialisasi. Minimal dari PLKB-nya ya. PLKB-nya Bu Jajuk minta disosialisasikan tentang UPPKS, atau bisa juga PLKB-nya sendiri yang ngomong, tapi waktu memberikan masukan itu belum masuk gitu ya jadi mereka belum ngeh kalo kita punya asosiasi. Sementara belum ada yang masuk diasosiasi. Tapi kita pernah diundang pertemuan UPPKS se-Kota Malang di Hotel Trio Indah itu, diharapkan Kampung KB yang sudah punya UPPKS juga masuk di asosiasi ini. Jadi Kotalama, Tlogowaru, Tanjung, Kauman, Dinoyo.”¹²

Dari pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa selama ini sosialisasi AKU di Kampung KB Kotalama hanya disampaikan PLKB-nya ke ketua UPPKS sehingga penyampaian terkait AKU belum sepenuhnya dimengerti masyarakat

¹¹ *Ibid*

¹² Wawancara dengan Ibu Djuwartriningsih selaku Ketua AKU Kota Malang pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 11.07 WIB

yang lain. Meskipun peran AKU sendiri begitu penting dalam kelompok UPPKS, apalagi UPPKS Kampung KB seharusnya menjadi prioritas pemerintah, namun kenyataannya dari semua Kampung KB yang ada di Kota Malang belum bergabung dalam AKU. Penyampaian yang dilakukan oleh PLKB belum sepenuhnya maksimal. Untuk itu seharusnya dari pihak AKU sendiri perlu ada inisiatif untuk terjun langsung ke masyarakat tanpa menunggu permintaan sosialisasi dari masing-masing PLKB Kampung KB. Sehingga masyarakat dapat terbujuk untuk bergabung dalam asosiasi tersebut mengingat peran AKU sendiri begitu kuat dalam membangun usaha masyarakat baik terkait permodalan yang dilakukan melalui simpan pinjam, maupun dari bantuan pemasaran. Sebagaimana penjelasan Ibu Djuwartriningsih berikut :

“ada juga yang kegiatannya itu bisa rutin, bisa tetap jalan, mereka yang punya usaha, kita mencari tabungan, mungkin Dinas Koperasi, Disperindag, atau mungkin Dinas Kesehatan untuk halal tidak halal nya produk ini bisa keluar, kan kita yang menjembatani. Jadi nanti kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Ada kelompok kita yang sudah punya usaha tapi belum punya ijin PIRT. Jadi kita upayakan. Jadi kita kerjasamanya lintas sektor, kalo tidak ya kita gak bisa jalan mbak. Trus kalo ada usaha ibu-ibu yang sudah ada, kita pemasarannya belum bisa , kita pemasarannya bekerjasama dengan dinas koperasi, kalo mereka punya momen apa , mungkin acara ulang tahun atau apa. Kayak kemarin DP3AP2KB ulang tahunnya Kota Malang kan pemberdayaan perempuannya mengadakan kegiatan gelar produk. Kita diundang buka *stand*. La nanti anggota-anggota yang mengisi dengan UKM se-Kota Malang. Jadi perannya kita itu menghimpun kelompok-kelompok biar nggak ada kesulitan, minimal ada yang membantu.”¹³

Terkait sosialisasi AKU sebenarnya sudah diketahui oleh ketua dan anggota UPPKS “Nusa Indah”, akan tetapi kendala yang dihadapi di lapangan sendiri yaitu kondisi masyarakat yang mengeluhkan minimnya waktu dan tenaga untuk

¹³ *Ibid*

mengikuti setiap kegiatan pertemuan. Apalagi kegiatan pertemuan AKU dilakukan rutin setiap sabtu kedua :

“iya, dulu itu pernah disosialisasikan, diberikan informasi oleh Bu Dina terkait UPPKS itu buat gabung sama perkumpulan UPPKS se-Kota Malang itu tadi, saya juga sebenarnya sudah mengajak anggota, cuma ya saya juga sadar melihat kondisi masyarakat disini itu kan semuanya punya kesibukan a mbak, terus jarang ada waktu. Yang punya usaha ya waktunya yang nggak ada kalo buat ikut perkumpulan begituan. Kayak Bu Titin itu dia cuek mbak kalau ada pertemuan. Usahanya kan sudah maju, pesanan dari mana-mana, jadi saya kira dia tanpa ikut AKU udah lancar usahanya. Nah tapi yang usaha kecil ini kan kasian. Saya pribadi juga ingin mendaftarkan, tapi tenaga saya juga terbatas mbak, umur juga sudah tua. Sama suami nggak boleh capek-capek banyak kegiatan, tapi kalau bukan saya ya siapa lagi mbak. Tapi dari sini itu sudah ada UPPKS yang gabung AKU, UPPKS Melati Putih mbak. Saya kira sudah diwakilkan itu saja.”¹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota UPPKS “Nusa Indah”, Ibu Sri Mulyati :

“ oh...iya iya saya pernah dengar . Itu ternyata pernah dikasih tau kok mbak tentang itu. Kalau nggak salah dapet info itu dari Bu Dina. Ya kalau pribadi saya pengen ikut mbak sebenarnya, cuma ya repot. Waktunya yang nggak ada. Karena disambi momong juga”.¹⁵

Penjelasan informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa selama ini sosialisasi terkait AKU sudah dilakukan ke anggota UPPKS “Nusa Indah”, akan tetapi dalam pelaksanaannya sendiri, masyarakat belum bisa berpartisipasi dikarenakan keterbatasan waktu. Padahal keberadaan AKU sendiri sangat penting dalam membantu usaha masyarakat terlebih usaha yang baru terbentuk yang masih membutuhkan bantuan pemasaran. Tidak hanya dalam hal pemasaran saja, tetapi kegiatan simpan pinjam yang ada di AKU juga dapat membantu masyarakat yang mau berwirausaha untuk terbantu dalam segi finansial. Dapat dikatakan

¹⁴ Wawancara Yuli Astutik, *Op.Cit*

¹⁵ Wawancara Sri Mulyati, *Op.Cit*

dengan keterlibatan AKU dalam kelompok UPPKS sebenarnya dapat mengangkat usaha masyarakat agar lebih mandiri dan maju.

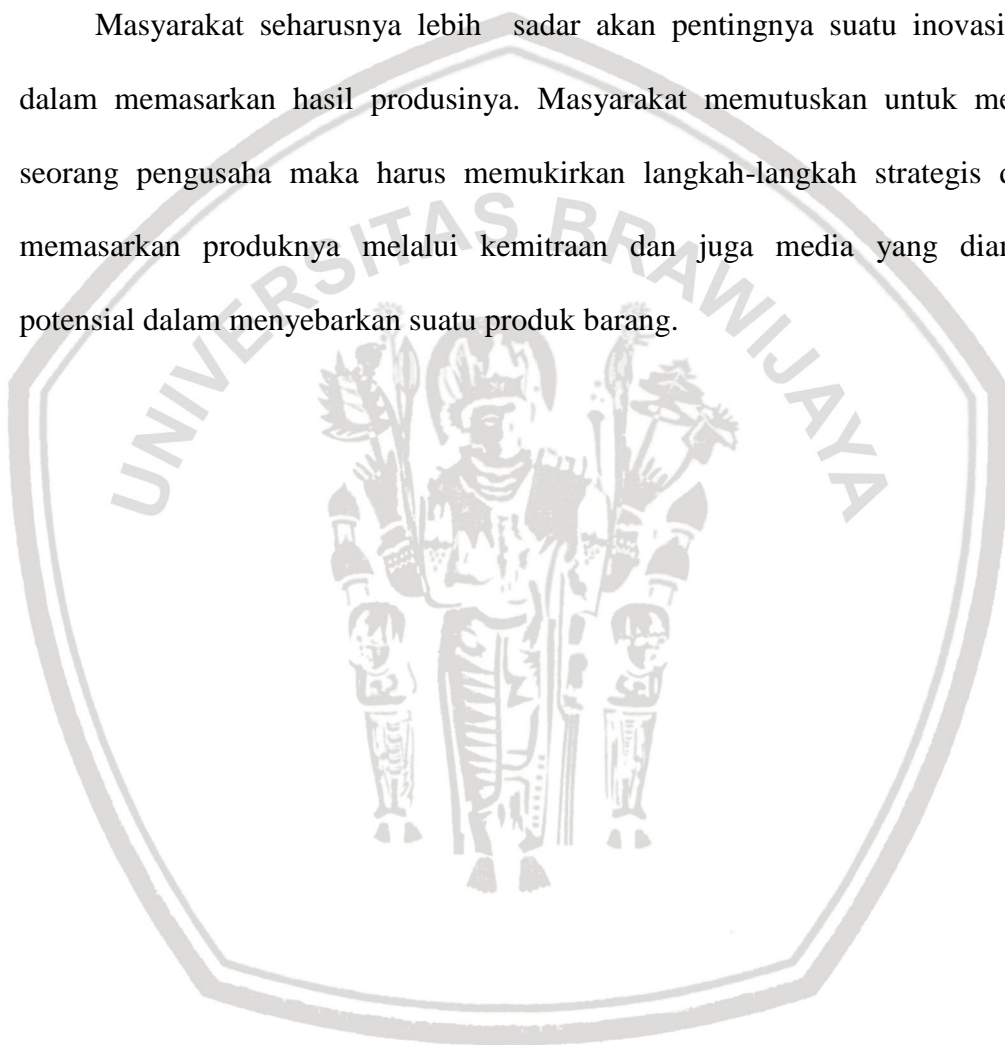
Selain UPPKS perlu menjalin mitra dengan AKU, diharapkan UPPKS yang ada di Kotalama juga memiliki relasi kemitraan dengan pihak lainnya yang bisa dijalin seperti pihak ketiga atau swasta. Karena dari awal kurang adanya pelatihan dari DP3AP2KB dan PLKB sebagai pendamping lapangan dalam strategi bisnis ternyata berpengaruh kepada masyarakat yang telah memiliki usaha untuk menjalin relasi kepada pihak lainnya. Meski skala usaha yang dimiliki oleh anggota UPPKS termasuk dalam usaha kecil setidaknya produk yang telah mereka hasilnya harus dipasarkan dengan baik melalui kemitraan yang telah terjalin. Bisa melalui gerai UMKM yang terletak di pusat oleh-oleh dan memiliki cabang diberbagai wilayah Kota Malang.

Penguatan kemitraan merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu usaha produksi di kalangan pengusaha, dikarenakan kemitraan tersebut berperan penting dalam memasarkan ataupun juga mengenalkan suatu produksi barang. Masyarakat yang memasarkan hasil produksinya hanya mengandalkan suatu lapaknya sendiri atau secara individu saja akan memperlambat akses pemasaran ke khalayak luas karena ketika suatu produksi agar bisa di konsumsi oleh konsumen harus dikenal dulu oleh konsumen dan mendapat pengakuan dari masyarakat luas.

Adanya kemitraan dalam memasarkan suatu produk akan mempercepat perluasan invansi pemasaran ke berbagai tempat yang dapat dijangkau oleh

konsumen secara efisien. Akan tetapi realitas yang terjadi pada Masyarakat di Kampung KB Kota lama sistem kemitraan dalam memasarkan produk masih belum terlaksana sesuai dengan keinginan pemerintah karena minimnya sosialisai antara masyarakat dan juga *stakeholder*.

Masyarakat seharusnya lebih sadar akan pentingnya suatu inovasi baru dalam memasarkan hasil produsnya. Masyarakat memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha maka harus memukirkan langkah-langkah strategis dalam memasarkan produknya melalui kemitraan dan juga media yang dianggap potensial dalam menyebarkan suatu produk barang.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok kegiatan UPPKS pada program Kampung KB sudah berjalan dengan cukup baik. Dengan adanya pemberdayaan UPPKS pada Program Kampung KB ini masyarakat mulai mampu menciptakan usaha guna meningkatkan pendapatan mereka. Meskipun dalam hal ini usaha yang mereka jalankan masih cukup sederhana dan belum terjangkau secara luas, namun masyarakat mulai mengalami peningkatan dari segi kualitas hidup mereka sebelumnya. Dari kegiatan pemberdayaan UPPKS pada program Kampung KB ini, masyarakat mulai mampu menciptakan dan mengembangkan produk unggulan Kampung KB Kotalama seperti bawang goreng dan bumbu-bumbu instan tradisional. Akan tetapi dalam pemberdayaan UPPKS sendiri mengalami beberapa kendala yang utama adalah bantuan modal dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan UPPKS. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terkait pemberdayaan UPPKS pada program Kampung KB di Kelurahan Kotalama yaitu:

Pertama, bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN untuk anggaran poktan UPPKS sangatlah minim. Sehingga keterbatasan dana tersebut masyarakat belum mampu mengembangkan usaha dengan baik. Untuk membantu tambahan modal bagi masyarakat berinisiatif sendiri menjalankan kegiatan simpan pinjam yang berasal dari dana PKK untuk

bantuan modal usaha mereka. Kebanyakan dari anggota UPPKS “Nusa Indah” dapat mengelola modal yang diberikan oleh PKK untuk usaha mikro saja. Selain itu pemerintah hanya memberikan bantuan kepada masyarakat berupa fasilitas alat bukan fasilitas dana, seperti alat pengpress-an yang memang sudah diajukan oleh kelompok UPPKS “Nusa Indah”.

Kedua, selama ini pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dalam poktan UPPKS ini melalui pelatihan dan pembinaan. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Kampung KB sendiri masih dinilai sangat minim. Pelatihan hanya dilakukan satu tahun sekali. Sedangkan untuk membina masyarakat Kampung KB dibutuhkan progress secara bertahap. Mengingat kondisi masyarakat Kampung KB yang terbelakang baik dari pendidikan, maupun sosial ekonomi masyarakat perlu dikembangkan. Selain pelatihan, pemerintah juga memberikan pembinaan dan membantu dari segi pemasaran melalui acara gelar produk. Akan tetapi lagi-lagi kegiatan tersebut hanya dilakukan setahun sekali sedangkan untuk gelar produk bergantung pada acara yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kota Malang.

Ketiga, dalam penguatan kelembagaan ini memiliki kendala tersendiri. Seperti UPPKS yang harus menggerakkan anggotanya, dimana saat ini partisipasi UPPKS Kampung KB Kotalama menjadi kendala tersendiri karena masyarakatnya yang apatis dan enggan untuk aktif dalam kegiatan UPPKS. Komunikasi antar *stakeholder* sudah baik, baik antara UPPKS terhadap PLKB dan komunikasi PLKB sebagai penyuluh terhadap lembaga di atasnya baik kelurahan dan dipihak DP3AP2KB juga baik. Hanya saja penguatan kelembagaan

ini terhalang oleh satu hal yaitu partisipasi masyarakat yang minim di wilayah Kotalama yang membuat proses pelaksanaan program kerja menjadi lamban.

Keempat, dalam menjalin kemitraan yang dilakukan oleh UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB Kotalama ini merupakan permasalahan serius. Dimana kunci dari keberhasilan usaha masyarakat terletak pada strategi marketing yang dijalankan. Selama ini, UPPKS “Nusa Indah” belum melibatkan kemitraan baik dengan Dinas Koperasi Kota Malang maupun Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kota Malang. Sehingga mereka terhambat untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan karena kurangnya kerjasama yang dibangun.

6.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun beberapa hal yang direkomendasikan kepada peneliti dalam memanfaatkan hasil penelitian tentang pemberdayaan UPPKS pada program Kampung KB di Kotalama. Adapun rekomendasi yang ditawarkan sebagai berikut:

6.2.1 Rekomendasi untuk masyarakat di Kampung KB Kotalama

Pertama, selama ini bantuan modal yang diberikan pemerintah dalam poktan UPPKS sangat minim. Akan tetapi dengan minimnya dana tersebut masyarakat mampu menciptakan usaha meskipun pada kemampuan usaha kecil. Dengan usaha kecil yang mereka jalankan ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Dengan meningkatkan kualitas produksi dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi khalayak konsumen. Sehingga tidak hanya menjalankan usaha secara monoton, tetapi perlu adanya inovasi-inovasi yang ditawarkan agar menjadi daya jual yang tinggi.

Kedua, pendampingan yang diberikan oleh pemerintah meskipun hanya dilakukan setahun sekali, masyarakat seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyerap ilmu yang diberikan secara maksimal. Bukan hanya memanfaatkan keuntungan yang didapat seperti pesangon, uang makan, dll. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk menguasai keterampilan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga pendampingan yang dilakukan secara singkat ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

Ketiga, perlu adanya kekompakan antara pengurus UPPKS “Nusa Indah” dengan PLKB. Sebagaimana peran keduanya sangat signifikan dalam menguatkan lembaga yang mereka jalankan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dibutuhkan. Tanpa adanya koordinasi dari pengurus UPPKS kepada PLKB maupun DP3AP2KB maka kelembagaan yang mereka jalankan akan lemah dan tidak mampu bersaing di era yang sudah modern ini.

Keempat, kemitraan yang dijalankan kelompok UPPKS “Nusa Indah” sangatlah minim. Tidak ada satupun pihak swasta yang terlibat baik dari pendampingan, pengelolaan, maupun pemasaran. Setidaknya dalam hal ini dibutuhkan menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti koperasi, UMKM, gerai atau pusat oleh-oleh, maupun AKU sendiri. Sehingga masyarakat merasa terbantu dari segi pemasaran maupun pengelolaan. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat agar menggait kerjasama dengan berbagai pihak agar usaha yang dijalankan tidak serta merta ditopang sendiri. Sangat disayangkan karena selama ini produk-produk UPPKS “Nusa Indah” sebenarnya dapat dikatakan mampu berdaya jual tinggi seperti sangkar burung, konveksi, sablon,

souvenir yang apabila dalam produk tersebut lebih diciptakan inovasi dan kreasi dalam segi *branding* dan *marketing*, akan memiliki nilai tambah tersendiri.

6.2.1 Rekomendasi untuk jajaran pemerintah Kota Malang

Pertama, meskipun dalam pelaksanaannya adalah bagian dari program DP3AP2KB Kota Malang, akan tetapi setiap mitra kerja yang terbentuk dalam program Kampung KB ini perlu terlibat. Terkait poktan UPPKS pemerintah perlu mengkaji apakah bantuan dana selama ini yang diberikan sudah cukup untuk kegiatan pelaksanaan Kampung KB. Kemudian perlu adanya upaya lebih lanjut terkait bantuan modal kepada masyarakat baik dengan membantu peminjaman modal dari koperasi, atau dari bank. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak berjalan sendiri untuk mencari modal bagi usaha mereka.

Kedua, pendampingan yang diberikan oleh pemerintah memang sudah dilakukan. Akan tetapi akan lebih baik apabila pemerintah memberikan bantuan pendampingan secara intensif kepada masyarakat. Sehingga wawasan yang diberikan kepada masyarakat dapat terserap dengan baik. Kemudian untuk menghindari pelatihan dengan biaya anggaran yang banyak, perlu diberikannya pendamping insitu, bukan eksitu seperti yang saat ini dijalankan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Kemudian pemerintah perlu memikirkan jangka panjang dari pelatihan yang diberikan. Karena selama ini masyarakat merasa bahwa pendampingan yang diberikan pemerintah melalui pelatihan dan pembinaan ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan kepada mereka.

Ketiga, perlu meningkatkan kerjasama tim yang baik antar stakeholder. Selama ini kehadiran stakeholder sangat minim dengan kegiatan Kampung KB. Kurangnya komunikasi menjadi penyebab kurangnya berjalan dengan baik program Kampung KB di Kota Malang.

Keempat, dalam kegiatan UPPKS, kemitraan merupakan aspek yang begitu penting karena terkait dengan usaha. Seperti yang diketahui selama ini kesulitan dan kendala masyarakat Kampung KB dalam kegiatan UPPKS ini adalah pemasaran. Masyarakat belum mampu menggandeng kemitraan untuk jangka panjang ke depan. Sehingga pemerintah perlu membantu masyarakat dalam memasarkan produk mereka. Bukan sekedar membawa *branding* mereka melalui acara gelar produk saja, tetapi juga perlu membantu untuk jangka kedepan bagaimana usaha yang dijalankan masyarakat ini tidak hanya dipasarkan di lingkungannya saja, tetapi juga dapat dijangkau oleh masyarakat luas dimanapun dan kapanpun, bukan berdasarkan momen saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendi, Sofian dkk. 1992. *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta :

Maleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.

Sugarto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama. Cet Ke-1.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Suryana. 2010. *Metodologi penelitian “model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif”* . Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Suryono.,Yoyon. 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pendekatan Strategis dan Pendidikan*. Yogyakarta: Gama Media.

Wirosuhardjo, Kartomo.2007.*Dasar-Dasar Demografi: Kebijakan Kependudukan*, Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jurnal / Skripsi :

Elsa Setiawati.2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli*.Jurnal.Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi diakses tanggal 5 Oktober 2016 di www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10694/231/

Istoria Hidayah, Novie.2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*.Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta

Lestari, Puji dkk,2007.*Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana (Penelitian Di Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul)*, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mardiyono. 2017. *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK dan Terkait di Jawa Timur. (Studi di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan)*. Jurnal Keluarga Berencana, Vol 2 No. 1, 2017 .
- Oktaviani Anisa Sevi, 2016. *Efektifitas Kebijakan Kampung Keluarga Berencana Terhadap Penerimaan Konsep Keluarga Berencana (Studi Kasus Faktor Institusional dan Faktor Sosial di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*. Tesis. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Purnami Wulandari, Ayu. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Yogyakarta
- Puspitawati, Herien. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press
- Rukmana, Indah Rizkia 2012. *Pengaruh Implementasi Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Soleha,Siti 2016. *Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*.
Skripsi. Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda.

Dokumen :

Badan Pusat Statistik. 2012. *Data Strategis*

BKKBN Tahun 1994

Buku Monografi RW Kelurahan Kota Lama Tahun 2017

Buku Petunjuk Teknis Kampung KB Bkkbn Tahun 2015

Data Inventari Kampung KB Kota Lama

Data Kependudukan di Wilayah Kampung KB Kelurahan Kotalama

Juknis Kampung KB.Pdf

Materi Kampung Kb.ppt

Profil Kampung KB Kotalama

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun
2015-2019.

Produk Hukum :

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan
Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi
Keluarga.

SE Gubernur Jawa Timur Nomor 440/9365/012.4/2017 Tentang Dukungan Lintas
Program/ Lintas Sektor pada Kampung KB di Jawa Timur

SE Mendagri Nomor 140/70/SJ Tentang Pencanangan dan Pembentukan
Kampung Keluarga Berencana

SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/236/KPTS/013/2017 Tentang Kelompok
Kerja Integrasi Program Pembangunan Lintas Sektor Dalm Kampung
Keluarga Berencana Jawa Timur Tahun Anggaran 2017

SK Lurah Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang No
400/18/3573031001/2016

SK Walikota Malang Nomor : 188.45/192/35.73.112/2017b Tentang Kelompok
Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Malang

Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Bapak Hambali selaku Anggota UPPKS “Nusa Indah”
Kampung KB Kotalama pada tanggal 18 Mei 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Joko Siswo Bintoro selaku Lurah Kotalama Kota
Malang pada tanggal 30 April 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Sapto Wibowo selaku Kabid Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Malang pada tanggal 2 Mei 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak Sulton selaku Kabid Pembangunan Masyarakat
DP3AP2KB Kota Malang pada tanggal 7 Maret 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Djuwartriningsih selaku Ketua AKU Kota Malang pada tanggal 12 Mei 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Purwati selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada tanggal 2 Mei 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Ika Susanti selaku Anggota UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB Kotalama pada tanggal 12 Juli 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Mani selaku Anggota UPPKS “Nusa Indah” Kampung KB Kotalama pada tanggal 26 Mei 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati selaku Anggota UPPKS “Nusa Indah” Kampung Kb Kotalama pada tanggal 18 Mei 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Titin selaku Anggota UPPKS “NUSA INDAH” pada tanggal 1 Mei 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Dina Mekarini selaku PLKB Kelurahan Kota Lama pada tanggal 28 Februari 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Astutik selaku Ketua UPPKS “NUSA INDAH” pada tanggal 28 April 2018

Web :

Badan Pusat Statistik,
<http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/SDKI> diakses pada
11 Juli 2018

Badan Pusat Statistik,
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18%2000:00:00/1219/persenta>

[se-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2017.html](#) diakses pada 11

Juli 2018

Badan Pusat Statistik. diakses dari <https://www.bps.go.id> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 15:18 WIB

Bidang Kesehatan Masyarakat: Kota Lama Aseptor KB Terendah, diakses dari <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/bidang-kesehatan-masyarakat-kota-lama-aseptor-kb-terendah/> pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 11.05 WIB

Badan Pusat Statistik, [https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-
penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-
provinsi-jawa-timur-2010-2014-dan-2015.html](https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2010-2014-dan-2015.html)

